

KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA
GUNA MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

RENNY FILDZAH SARI ZULLINI

NPM : 1551010099

Jurusan : Ekonomi Syari'ah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2019 M

KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA
GUNA MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

RENNY FILDZAH SARI ZULLINI

NPM : 1551010099

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.

Pembimbing II : Mardiyah Hayati, S.P., M.S.I.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2019 M

ABSTRAK

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah kebijakan fiskal Indonesia guna mengentaskan kemiskinan melalui dana desa dalam perspektif ekonomi Islam ? dan Tinjauan ekonomi islam terhadap instrumen kebijakan fiskal ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan fiskal dalam mengentaskan kemiskinan melalui dana desa dan tinjauan ekonomi islam terhadap instrumen kebijakan fiskal.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek kajian yang sedang disusun. Untuk menganalisis data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya titik persamaan asas dan tujuan kebijakan fiskal negara Indonesia. Bahkan, beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah merupakan reformulasi pajak yang diterapkan pada masa awal islam. Dengan demikian, sistem kebijakan fiskal negara Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan masih dalam koridor syari'ah. Hanya saja, implementasi sistem tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Sedangkan pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam tidak hanya terletak pada unsur kepemimpinan saja, melainkan anjuran untuk menumbuhkan kualitas diri pribadi serta sosial agar mampu berkontribusi juga dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Adanya peluang bagi negara untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peluang tersebut didasarkan pada keberadaan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang diharapkan dapat membantu keuangan negara.

Kata Kunci : *Kebijakan Fiskal, Kemiskinan, Ekonomi Islam*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabararakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENNY FILDZAH SARI ZULLINI
NIM : 1551010099
Jurusan/Prodi : EKONOMI SYARI'AH
Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA GUNA MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabararakatuh

Bandar Lampung, 21 Agustus 2019

Penulis,

Renny Fildzah Sari Zullini
NPM. 1551010099



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame - Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA GUNA
MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI DANA
DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

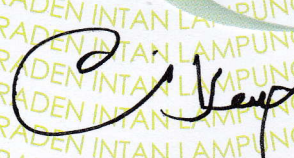
Nama : **Renny Fildzah Sari Zullini**
Npm : **1551010099**
Jurusan : **Ekonomi Syaria'ah**
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

untuk dimunaqosahkan dan diperintahkan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

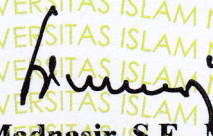
Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.
NIP. 19530423198003100


Hj. Mardhiah Hayati, S.P., M.S.I.
NIP. 197605292008012010

Ketua Jurusan,


Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA GUNA MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** disusun oleh: **Renny Fildzah Sari Zullini, NPM: 1551010099**, Program Studi **Ekonomi Syariah**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Jum'at/06 September 2019**, di ruang seminar III, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Isnaeni, M.A

Sekretaris : Zathu Restie Utamie, M.Pd

Penguji I : M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy

Penguji II : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP:198008012003121001

MOTTO

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَنْقُومِ الْعَبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ
أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ

مُجِيبٌ ﴿٦١﴾ (هود (١١) : (٦١))

Artinya : “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata : “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do’a hamba-Nya).”¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), h. 23

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Terimakasih yang tak terhingga kepada Yang terkasih dan tersayang dalam hidupku, Ayahanda Sarjono, Ibunda Sri Utami yang telah mendidiku, menyekolahkanku hingga perguruan tinggi, serta do'a dan dukungan yang tiada henti dalam menyertai setiap langkah dalam mencapai jenjang pendidikan hingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana dan adik-adikku, Reovi Salsabila Sari dan M. Reyhan Shafiulla Haufanhazza atas semua do'a, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis selama ini dalam menjalani proses kehidupan. Juga untuk keluarga besarku, kakekuwo, alm. nenekuwo, alm. mbokuwo, alm. pakuwo, paman dan bibik, skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka semua.
2. Sahabat ku tersayang Akrim Mufadiyah, Putri Nimas Anggraini, Uswatun Hasanah, Aprilia imanuri, Cahya Dina sartika, dan Palupi Pratiwi yang bersedia menemani dan berbagi cerita mulai dari yang paling konyol sampai paling sedih, di setiap episode-episode hidup penulis selama ini. *But, There's no "ending" word in our story !!we're on kind of the best friendship stories ever, Are not we ??.*
3. Para sahabat dan teman-teman tercinta yang telah membantu memberikan motivasi, semangat dan dukungan untukku.

4. Angkatan Ekonomi Islam Tahun 2015, serta kawan-kawan EI A, rekan-rekan MAN 1 Bandar Lampung, yang telah membantu membagi waktu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan,
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama oleh ayahanda dan ibunda yaitu Renny Fildzah Sari Zullini. Dilahirkan di Kalianda, 12 Oktober 1996. Putri pertama dari tiga bersaudara atas pasangan Bapak Sarjono dan Ibu Sri Utami.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. Pendidikan TK Citra Insani Rawajitu Timur lulus tahun 2003.
2. Selanjutnya, di SDS Citra Insani Rawajitu Timur lulus tahun 2009.
3. Lalu dilanjutkan di MTs Al-Ikhlas lulus tahun 2012.
4. Kemudian dilanjutkan di MAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2015.
5. Terdaftar sebagai Mahasiswi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tahun 2015.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. sang pemilik dan pemberi cinta, yang telah memberikan begitu banyak berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA GUNA MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**. Sholawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliyahan menuju zaman yang penuh dengan hamparan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada pihak lain yang mendukung penulisan skripsi ini diantaranya kepada :

1. Bapak Dr.Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing

kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di jurusan Ekonomi Islam dengan baik dan lancar.

3. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A. dan Ibu Mardiyah Hayati, S.P., M.S.I. selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami.
5. Keluarga seperjuangan kelas Ekonomi Islam A angkatan 2015, atas pertemanan yang kompak, cerita, semangat, dukungan, bersama-sama menajalani suka maupun duka selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Proud to be a part of you*, tak terkecuali semua rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuannya, baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap semoga dengan Rahmat dan Izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019

Renny Fildzah Sari Zullini
NPM.1551010099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Identifikasi Masalah	12
E. Batasan Masalah.....	14
F. Rumusan Masalah	14
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
H. Kerangka Pikir.....	16
I. Metode Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Ekonomi Islam Tentang Kebijakan Fiskal	22
1. Kebijakan Fiskal.....	22
a. Definisi Kebijakan Fiskal.....	22
b. Fungsi Kebijakan Fiskal.....	25

c. Tujuan Kebijakan Fiskal	25
2. Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam	26
a. Sumber-sumber Pendapatan Negara Islam	27
1) Zakat	28
2) Jizyah	28
3) Kharaj	30
4) Usyr'	31
5) Ghanimah	32
6) Wakaf	32
7) Sedekah	33
8) Pajak	33
b. Pengeluaran Negara Islam	34
3. Kemiskinan	36
a. Definisi Kemiskinan	36
b. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan	39
c. Indikator Kemiskinan	40
d. Dampak Kemiskinan	40
e. Solusi Terhadap Kemiskinan	42
B. Tinjauan Umum Ekonomi Konvensional Tentang Kebijakan	
Fiskal	44
1. Kebijakan Fiskal	44
a. Definisi Kebijakan Fiskal	44
b. Fungsi Kebijakan Fiskal	47
c. Jenis Kebijakan Fiskal	49
d. Tujuan Kebijakan Fiskal	50
2. Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara	52
a. Pendapatan Negara	52
1) Penerimaan Pajak	53
2) Penerimaan Negara Bukan Pajak	55
b. Pengeluaran Negara	57

3. Kemiskinan.....	58
a. Definisi Kemiskinan.....	58
b. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan.....	60
c. Indikator Kemiskinan.....	61
d. Macam-macam Kemiskinan.....	64
e. Dampak Kemiskinan.....	66
f. Solusi Terhadap Kemiskinan.....	67
C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	70
BAB III PENYAJIAN DATA	
A. Gambaran Umum Profil Negara Indonesia.....	73
1. Profil Negara Indonesia.....	73
2. Posisi dan Letak Geografis.....	75
3. Sumber Daya Alam.....	76
4. Perekonomian Indonesia.....	79
B. Kebijakan Fiskal Indonesia Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Dana Desa.....	82
BAB IV ANALISA PENELITIAN	
A. Kebijakan Fiskal Indonesia Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	96
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Instrumen Kebijakan Fiskal.....	102
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	110
B. Rekomendasi.....	111
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014-2018.....	5
Tabel 2.1 Pengeluaran Negara Dalam Islam	35
Tabel 3.1 Ringkasan APBN 2014-2018	83



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2014-2018.....	8
Grafik 3.1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2014-2018.....	84
Grafik 3.2 Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan Tahun 2014-2018	85
Grafik 3.3 Dana Desa dalam APBN Tahun 2015-2018.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	17
Gambar 3.1 Perkembangan Subsidi Tahun 2015-2019	88
Gambar 3.2 Perkembangan Dana Desa di Setiap Provinsi Tahun 2015-2017	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini. Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka perlu adanya penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah “KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA GUNA MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.¹

¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 255

2. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal.²
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³
4. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan berproduksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam kerangka mencari maisyah (penghidupan individu maupun kelompok atau negara sesuai ajaran islam) atau berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian untuk membahas lebih dalam mengenai kebijakan pemerintah tentang penerimaan dan pengeluaran negara guna mengentaskan kemiskinan perspektif ekonomi Islam.

²Mardiana, Theresia Militina, Anis Rahma Utary, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Infrastruktur terhadap Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan". *Jurnal Inovasi*", Vol. 13 (1), (2017): 50-60

³PP No. 43 Tahun 2014, Bab I Pasal I ayat 8

⁴Hasan Andy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), h. 11

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut :

1. Secara objektif

Negara adalah pemegang otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah yang kerap kali bersinggungan langsung dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang ekonomi. Salah satu kebijakan penting yang berada didalam otoritas pemerintah adalah kebijakan fiskal, dimana negara berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan ini dapat membantu mengatasi persoalan fundamental kemiskinan. Pemaparan tersebut peneliti simpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah pembangunan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Secara subjektif

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini didukung oleh tersedianya data-data dan berbagai literatur yang dibutuhkan dalam penelitian penulis sebagai referensi. Selain itu, judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan yang penulis tempuh yaitu Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pendirian negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, disamping guna mencapai tujuan lainnya. Dalam perjalanannya, pemerintah Indonesia telah melakukan terobosan untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Berbagai kebijakan telah diambil, mulai dari pengaturan sektor perpajakan, distribusi barang dan jasa, hingga melakukan utang dalam dan luar negeri.

Ditinjau dari potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, selayaknya rakyat negeri ini hidup dengan sejahtera. Namun dalam realita, telah terjadi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Pemilik modal mendapatkan keuntungan besar melalui pemanfaatan sumber daya alam, sedangkan negara cukup puas dengan sejumlah royalti dan pajak dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut.⁵

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah dan pajak.⁶ Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak.⁷

⁵Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), h. 43-44

⁶Minarni, *Falsifikasi Kebijakan...*, h. 55

⁷Nurul Ichsan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam". *Jurnal Pemikiran Islam*", Vol. 19, No. 2, (September, 2018): 75-91

Pendapatan yang nantinya masuk kedalam APBN tersebut diantaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan non pajak serta dana hibah. Hingga saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara ini. Namun pada kenyataannya, dalam penerimaan pajak sering kali terjadi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab. Pajak sendiri disalurkan untuk membiayai kepentingan masyarakat melalui pembiayaan fasilitas publik seperti pembiayaan pembangunan jembatan, penerangan jalan, jalan raya, serta fasilitas keamanan dan lain-lain.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Tahun 2014-2018 (Triliun Rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Belanja Negara	Defisit
2014	1.667,1	1.842,5	-175,4
2015	1.793,6	2.039,5	-245,9
2016	1.822,5	2.095,7	-273,2
2017	1.750,3	2.080,5	-330,2
2018	1.894,7	2.220,6	-325,9

Sumber : *Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2019*

Problematika APBN Indonesia setiap tahunnya selalu sama, negara mengalami defisit anggaran setiap tahunnya. Antara penerimaan APBN dan belanja APBN terpatok sekian persen dengan jumlah yang cukup besar.

Sudah seharusnya defisit anggaran Indonesia menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah Indonesia. Hal ini tak lain sebagai upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat sendiri. Terlebih lagi masalah klasik Indonesia yang belum terselesaikan adalah kemiskinan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2014-2015 terjadi peningkatan jumlah pendudukan miskin. Sejak tahun 2015, APBN difokuskan terhadap pembiayaan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan kesenjangan antar wilayah Indonesia dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang baik dan berkelanjutan kemudian dua tahun kemudian dilakukan efisiensi pada perbelanjaan operasional, namun masih berfokus pada pengembangan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan kesenjangan sosial, serta penambahan lapangan kerja. Defisit anggaran ini apabila terus menerus berkelanjutan maka akan timbul permasalahan baru yang mengganggu stabilitas perekonomian negara.⁸

Ragiman mengemukakan bahwa, pengangguran dan kemiskinan merupakan momok dari banyak negara apalagi negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah sendiri selalu memfokuskan program pembangunan pada penanganan kedua masalah tersebut walaupun hasilnya masih belum sepenuhnya memuaskan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, tiga strategi pembangunan ekonomi, yaitu *pro growth*, *pro job* dan *pro poor*. Termasuk di dalamnya mewujudkan pertumbuhan disertai pemerataan (*growth with equity*). Ketiga strategi itu diharapkan sebagai pendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan lebih

⁸Ahmad Maslahatul Furqan, Salahuddin, Rizqi Anfanni Fahmi, "Diskursus Zakat Sebagai Sumber Penerimaan APBN". *Working Paper Keuangan Publik Islam*", No. 3, Seri 1, (2018)

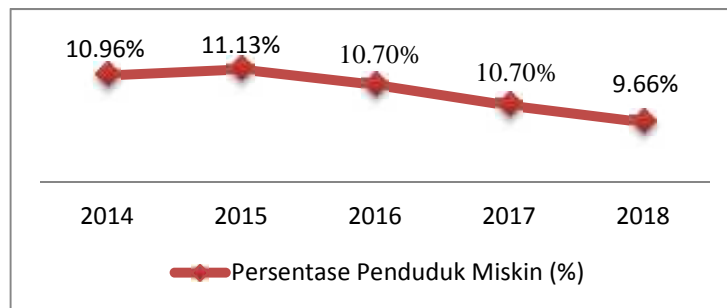
banyak kesempatan kerja dengan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan juga lembaga keuangan.⁹

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.

⁹Ragiman, "Masalah Pengangguran dan Kemiskinan", <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id>, diakses pada 14 Januari 2019 pada jam 15.12 WIB.

Berikut disajikan persentase penduduk miskin di Indonesia dalam periode 2014-2018 adalah sebagai berikut :

Grafik 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 2014-2018 (Persen)



Sumber : *Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2019*

Pada tabel diatas persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2014-2018, meskipun terjadi peningkatan kemiskinan pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,13% dari 10,96% di tahun 2014.

Dalam perkembangannya pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, terutama didaerah perdesaan agar tidak ada lagi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah mengesahkan undang-undang tentang desa. Salah satu strategi pemerintah agar membuat desa menjadi mandiri adalah dengan memberikan dana desa. Dana desa merupakan amanah atau buah atas disahkannya UU No. 6 Tahun 2014. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan

bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan dan belanja daerah/kota.¹⁰

Untuk menurunkan tingginya tingkat kemiskinan, berbagai program pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan. Pada era Jokowi anggaran dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Digulirkan sejak 2015, dana desa awalnya hanya sebesar Rp 20,8 triliun. Kemudian pada 2016 menjadi Rp 46,9 triliun. Lalu pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp 60 triliun.¹¹

Dengan anggaran yang sangat besar itu, pemerintah mempunyai solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Pertama, penyaluran bantuan langsung dalam bentuk seperti BLT, raskin, dana BOS, Jamkesmas (Askekskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan masih banyak lagi. Kedua, program pemberdayaan masyarakat kecamatan dan didesa didaerah tertinggal dan khusus. Seperti pemberdayaan dalam bidang aspek : pendidikan, ekonomi, jalan, jembatan, dan sebagainya. Ketiga, pemberian pinjaman bagi masyarakat yang bergerak dalam usaha mikro, kecil dan menengah juga koperasi.¹²

Fungsi fiskal menurut konvensional adalah sebuah fungsi dalam tataran perekonomian yang sangat identik kemampuan yang ada pada pemerintah dalam masalah menghasilkan pendapatan untuk menutupi kebutuhannya dan lalu mengalokasikan anggarannya yang ada, atau bisa disebut dengan anggaran

¹⁰PP No. 43 Tahun 2014, Bab I Pasal I ayat 8

¹¹Pajar Hatma Indra Jaya, "Dream and Proverty Alleavition". *Jurnal Mimbar*", Vol. 33, No. 1, (Juni,2017)

¹²Anang Sholihin Wardan, *Peduli Kemiskinan*, (Bandung, Rosda, 2009), h. 17

belanja negara dan juga mendistribusikannya agar tercapai apa yang dinamakan dengan efisiensi anggaran. Sedangkan instrument fiskal yang bisa digunakan adalah pajak dan anggaran. Dalam pandangan ekonomi Islam pendapatan dan anggaran merupakan alat yang efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan ekonomi.¹³

Bahasan menarik yang layak dicermati dalam banyak praktik ekonomi di masyarakat adalah acuan tentang bagaimana rumusan kebijakan fiskal yang mengedepankan kepentingan umum, terutama kaum lemah (fakir dan miskin). Pemikiran tersebut didasarkan realistis bahwa dalam banyak peraturan dan perhelatan ekonomi, kaum fakir dan miskin selalu berada pada pihak yang lemah, terpinggiran serta menjadi pusat eksploitasi.

Dalam sejarah perkembangan peradaban Islam ditunjukkan atas gagasan dan rancangan keuangan serta perencanaan garis-garis kebijakan fiskal masa awal telah membahas berbagai persoalan keuangan publik, seperti pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara.

Esensi kebijakan fiskal sebagaimana tersebut diatas sungguh *include* dengan eksistensi negara menurut islam yaitu kewajiban negara atas rakyatnya adalah melayani dan mengurus urusan umat. Hal itu ditegaskan Nabi SAW. sabdanya:

¹³M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 149-150

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... (رواه البخارى)

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya. . .”(H.R. Bukhori).¹⁴

Merujuk dari hadits Rasulullah tersebut, salah satu urusan umat yang wajib dilaksanakan oleh negara (*Daulah Islamiyah*) adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga pada akhirnya negara menjadi kuat. Pada masa Rasulullah masih hidup, kebijakan fiskal sesungguhnya telah ada, kendatipun dalam bentuk yang masih sederhana, karena sistem administrasi pemerintahan pada masa Nabi belum begitu kompleks. Ini dapat dipahami karena beliau hidup di negara kecil Madinah yang baru berdiri, dan dengan kebijakan ekonomi yang masih sangat sederhana.

Bentuk kristalisasi fiskal lain masa Rasulullah adalah perintah zakat yang mulai diwajibkan pembayarannya pada tahun ke 9 Hijriyah. Pola kebijakan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sesungguhnya esensinya mulai dapat ditangkap bahwa kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara telah ada dan diatur untuk lalu lintas pembiayaan negara sebagaimana kontekstualitas pada masa itu. Dalam konteks kebijakan fiskal, zakat mendapat perhatian yang paling banyak diantara berbagai sumber pendapatan negara.¹⁵

¹⁴ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab: Shalat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadist : 844 (Berut : Dar as-Sa’bu, t.t), 139. Ngalm Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, Cet. VII (Jakarta: Sumber Wijaya, 1992), h. 49

¹⁵ *Ibid.*, h. 21-22

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beragam program yang diluncurkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan. Memang terdapat indikasi kuat bahwasanya meskipun terdapat kecenderungan positif dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi ternyata implikasinya belum seperti yang diharapkan. Proporsi penduduk yang hampir miskin masih cukup tinggi dan apabila terjadi sedikit ‘gejolak’, maka dengan sangat mudah mereka akan kembali menjadi miskin.¹⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ”**KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA GUNA MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**”

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian ini, maka terdapat permasalahan yang akan menjadi bahasan penulis. Perumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Problematika APBN Indonesia setiap tahunnya selalu sama yaitu negara mengalami defisit anggaran.
2. Defisit anggaran timbul akibat lebih rendahnya pendapatan negara dari pada kebutuhan anggaran untuk belanja.

¹⁶Ayief Fathurrahman, “Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*”, Vol. 13, No. 1, (April, 2012): 72-82

3. Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah baik dari dalam dan luar negeri.
4. Di Indonesia penerimaan negara yang bersumber dari pajak masih relatif rendah, penyebabnya karena kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar pajak.
5. Pengeluaran pemerintah secara rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, subsidi dan lain-lain.
6. Dalam realisasinya belanja negara tercatat meningkat lebih cepat dibandingkan jumlah pendapatan yang diterima negara.
7. Dalam penerimaan pajak sering terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
8. Kemiskinan masih menjadi permasalahan klasik Indonesia yang belum terselesaikan.
9. Munculnya kemiskinan ditandai dengan adanya keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu munculnya ketimpangan pendapatan.
10. Secara lokasi tempat kemiskinan ternyata berada di wilayah pedesaan.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dan karena kebijakan fiskal negara Indonesia sangat luas sekali maka peneliti membatasi penelitian yang berjudul “ Kebijakan Fiskal Indonesia Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dengan batasan hanya soal penerimaan dan pengeluaran dari tahun 2014-2018. Peneliti lebih memfokuskan penelitian pada sisi penerimaan dan pengeluaran negara guna mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui dana desa dalam perspektif Ekonomi Islam.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan fiskal Indonesia guna mengentaskan kemiskinan x melalui dana desa dalam perspektif ekonomi Islam ?
2. Bagaimanakah tinjauan ekonomi islam terhadap instrumen kebijakan fiskal ?

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan fiskal guna mengentaskan kemiskinan melalui dana desa dalam perspektif ekonomi Islam.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan ekonomi islam terhadap instrument kebijakan fiskal.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu :

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan Ilmu Ekonomi Islam.

- b. Secara praktis

Penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis dapatkan didalam perkuliahan serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Kerangka Pikir

Dalam memperhatikan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk itu maka penulis menguraikan landasan berpikir penelitian ini yaitu berlandaskan dari al-qur'an dan sunnah sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam.

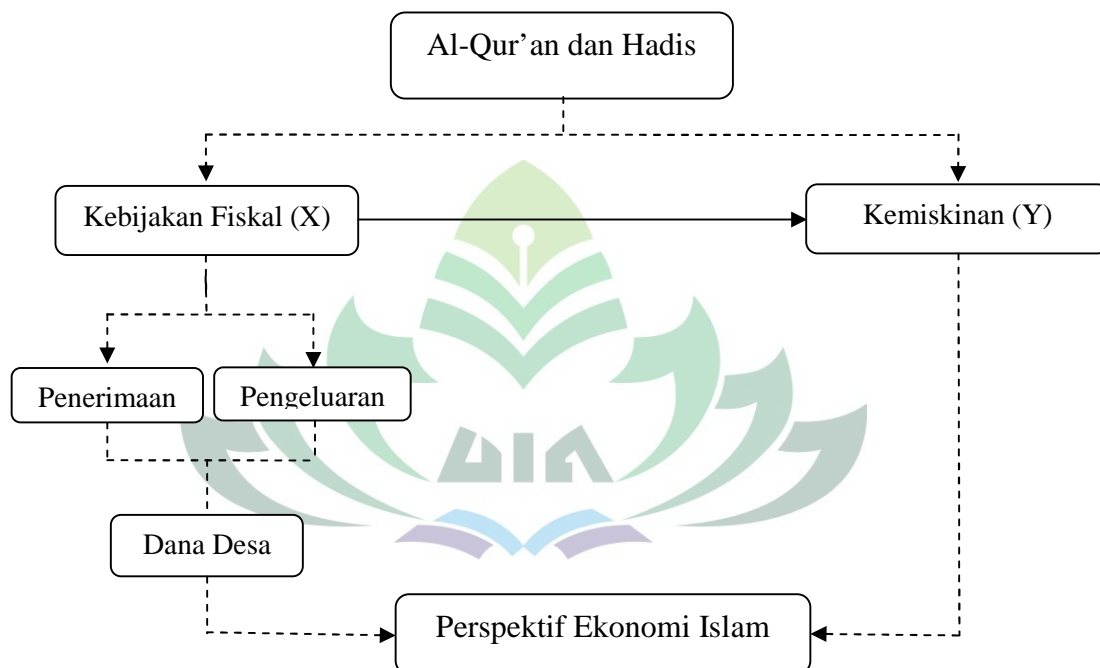
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Penarikan kesimpulan ini bertujuan agar definisi kebijakan fiskal mengandung makna umum, artinya ia merupakan suatu gambaran yang bisa terjadi dalam berbagai sistem ekonomi. Selanjutnya, karena instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara, maka kebijakan fiskal sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara yang ingin dicapai. Dengan kata lain, target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ingin dicapai oleh pemerintah.¹⁷

¹⁷Rasiam, "Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Solusi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi)". *Jurnal Khatulistiwa*". Vol. 4, No. 1, (Maret, 2014)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan fiskal yaitu pada sisi penerimaan dan pengeluaran dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui dana desa perspektif ekonomi Islam.

Adapun kerangka pikir untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pikir



Keterrangan: - - - - - : Secara tidak langsung
 ————— : Secara langsung

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁸ Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data-majalah, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran atas buku-buku, surat kabar, pemecahan masalah serta pencarian kebenaran dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁹ Dimana penyusun memaparkan ketentuan islam tentang pendapatan negara beserta pendistribusiannya dan kebijakan fiskal yang terdapat di Indonesia yang kemudian dianalisa untuk mengkorelasikan dengan ajaran Islam.

¹⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 58

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham kualitatif.²⁰ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan diperoleh melalui data-data dari berbagai literatur yang erat kaitannya dengan objek. Data ini diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik), Website resmi Kementerian Keuangan, Jurnal maupun Artikel Ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data kepustakaan, maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²¹ Pelaksanaan metode dokumentasi ini yaitu dengan mencatat data yang ada pada dokumen-dokumen, buku pedoman, dan arsip yang berhubungan dengan kebijakan

²⁰Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 19

²¹Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

fiskal guna mengentaskan kemiskinan melalui dana desa perpektif ekonomi Islam

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat Kualitatif sehingga data-data akan digambarkan dengan kata-kata tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, dalam proses analisis data, ada beberapa langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.²²

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mulai dipahami. Selain itu juga, penyajian data bisa

²²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.²³

c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang kredibel, karena seperti telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.²⁴



²³*Ibid.*, h. 249

²⁴*Ibid.*, h. 252

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Ekonomi Islam Tentang Kebijakan Fiskal

1. Kebijakan Fiskal

a. Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah komponen penting kebijakan publik. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan pemerintah dalam hal penerimaan, pengeluaran, dan utang. Peranan kebijakan fiskal dalam suatu aktivitas ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi.²⁵

Pada sistem ekonomi Islam, hak pemilik swasta diakui, pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya. Hal ini merupakan komitmen yang bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang besar jumlahnya, tetapi juga membantu meningkatkan spiritual yang menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin.²⁶

Majid mengatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera pemerintah Islam menggunakan dua kebijakan, yaitu

²⁵Pratama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro dan Suatu Pengantar edisi 3*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 97

²⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 54

kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah dan Khulafurasyiddin.²⁷

Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, et. al., dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut *government expenditure*).²⁸ Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.²⁹

Menurut Sadono Sukirno kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.³⁰ Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai

²⁷M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf : Relevansinya dengan ekonomi kekinian*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), h. 221

²⁸Mustafa Edwin Nasution, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 203

²⁹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 159

³⁰Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 170

tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk memengaruhi jalannya perekonomian.³¹

Berpijak pada rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit, atau surplus.

Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun mengajukan obat untuk resesi berupa untuk mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar dala hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain pun akan ikut menurun, bahkan dalam agregat yang lebih besar. Selain itu, Abu Yusuf adalah ekonom pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya *Al-Khara*, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.³²

³¹M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi...*, h. 215

³²Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25

b. Fungsi Kebijakan Fiskal

Fungsi daripada sektor kebijakan fiskal menurut Islam :

- 1) Pemeliharaan terhadap hukum, keadilan dan juga pertahanan
- 2) Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi
- 3) Manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN
- 4) Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan.

Fungsi ini pada dasarnya berlaku sama di dunia ini, meskipun dalam berbagai praktik dan implementasinya seringkali berbeda dan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di dalam sebuah pemerintahan yang ada di dalam negara tersebut. Karena islam merupakan agama Rahmatallil'alamiin, maka fungsi ini tidak hanya berlaku di negara islam saja, akan tetapi juga berlaku bagi negara-negara yang bukan negara Islam atau negara yang penduduknya mayoritas Islam, tetapi bukan berbentuk sebagai negara Islam.³³

c. Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Dalam ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung

³³*Ibid.*, h. 216

ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran islam seluas mungkin.

Menurut Metwally, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam:

- 1) Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang telah tinggi.
 - 2) Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman.
 - 3) Ekonomi islam mempunyai komitmen yang membantu ekonomi masyarakat yang berkembang dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin.³⁴
2. Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam

Dalam pemerintahan Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah saw. Hingga zaman pertengahan. Pada zaman Rasulullah saw. dan para sahabat baitul mal adalah lembaga pengelola keuangan negara sehingga terdapat kebijakan fiskal seperti yang kita kenal saat ini.

Dalam sistem ekonomi konvensional (non islam), kita mengenal adanya istilah pajak (*tax*) yaitu sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib

³⁴*Ibid.*, h.104

kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian *dharibah* diartikan dengan pajak. *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non islam.³⁵

Pada awal-awal pemerintahan Rasulullah pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Rasulullah sebagai pemimpin melaksanakan tanggung jawab pemerintahan tanpa mendapatkan upah dari negara maupun masyarakat, kecuali hadiah kecil berupa makanan. Sumber pendapatan negara diperoleh dari kontribusi sukarela untuk membiayai pertempuran-pertempuran dan biaya sosial lainnya.³⁶

a. Sumber-sumber Pendapatan Negara Islam :

1) Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta yang telah memenuhi syarat syariat islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah

³⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut...*, h. 29

³⁶*Ibid.*, h.57

ditetapkan dalam syariat islam.³⁷ Dalam hal ini latar belakang perintah zakat dituliskan dalam Al-qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (التوبة (٩): ١٠٣)

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*³⁸

2) Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Salah satu ciri khas masyarakat muslim adalah menjaga saudaranya muslim atau non-muslim dari rasa aman. Oleh karena itu, pada masa nabi Muhammad SAW orang-orang Kristen dan Yahudi, dikecualikan dari kewajiban menjadi anggota militer di negara Islam. Mereka memperoleh konsensi bahwa negara islam akan menjamin keamanan pribadi dan hak milik mereka. Sebagai

³⁷Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, dan Nurul Huda, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 205

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 162

gantinya maka orang-orang non-Muslim diwajibkan mengganti dengan pembayaran jizyah. Dijelaskan dalam firman-Nya:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٩﴾
(التوبة: ٢٩)

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”*³⁹

Meskipun *jizyah* merupakan hal wajib, namun dalam ajaran islam ada ketentuan, yaitu bahwa wajib *jizyah* dikenakan kepada seluruh non muslim dewasa, laki-laki, yang mampu membayarnya. Sedangkan bagi perempuan, anak-anak, orang tua dan pendeta dikecualikan sebagai kelompok yang tidak wajib ikut bertempur dan tidak diharapkan mampu ikut bertempur. Orang-orang miskin, penganggur, pengemis, tidak dikenakan pajak. Hasil pengumpulan

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 152

dana dari jizyah, digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum.⁴⁰

3) *Kharaj*

Kharaj merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata. Kebijakan ini berawal pada tahun ketujuh Hijriyah dimana pada saat itu tanah Khaibar telah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Tanah-tanah tetap dibiarkan untuk dimiliki oleh pemilik lama. Namun ketika panen, maka sebagian dari hasil panen diberikan kepada negara islam. Konsep tersebut juga pernah dijalankan oleh Umar bin Khattab ketika menguasai Irak dan Syam. Tanah tersebut tidak dibagi-bagikan, tetapi diharuskan membayar *kharaj* saat panen.⁴¹ Jadi, *kharaj* pada awalnya hanya dikenakan bagi non muslim sebagai biaya sewa atas tanah yang dimiliki negara Islam karena telah menaklukkan wilayah tersebut, sehingga objek dari *Kharaj* adalah tanah yang berada di luar wilayah pusat pemerintahan Jazirah Arab (hanya tanah taklukkan).⁴²

⁴⁰Eko Surayitno, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 179

⁴¹Abdul Sami' Al-Misri, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, Terj. Dimyauddin Djuwaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 71

⁴²M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 250

4) *Usyr'*

Pengertian *Usyr'* adalah suatu yang diambil oleh negara dari para pedagang yang melewati negaranya. *Usyr'* bisa disebut juga dengan istilah bea cukai. *Usyr'* merupakan pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam, atau datang dari negara islam itu sendiri.⁴³ Perpajakan atas barang-barang diwilayah perbatasan atau persimpangan perbatasan tertentu dipraktikkan semenjak dimulainya perdagangan antar wilayah pada masa awal Islam sampai pada masa Khalifah Abbasiyyah. Adapun besarnya bea cukai ini bagi pedagang kafir adalah 10%, bagi kafir dzimmi 5%, dan bagi pedagang muslim adalah 2,5% yang dipungut setiap harinya.⁴⁴

5) *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh umat islam dari kemenangan perang melawan kafir.⁴⁵ Al-Qur'an telah mengatur pembagian ghanimah secara jelas. Firman Allah dalam Qur'an :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ

⁴³Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab". *Jurnal Al'-Adl*", Vol. 6 , No. 2, (Juli, 2013)

⁴⁴Wahyu Wibisana, "Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*", Vol. 14, No. 1, (2016)

⁴⁵Isnaini Harahap, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 241-242

وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ (الأنفال (٨) : ٤١)

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.”⁴⁶

6) Wakaf

Dalam hukum islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan (wakif) dan bukan pula hak milik nadzir/lembaga pengelola wakaf tetapi menjadi milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf telah dituliskan dalam al-Qur'an :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ (آل عمران (٨) : ٩٢)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 145

cintai.dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁴⁷

7) Sedekah

Sedekah berasal dari kata (*shadaqa*) yang berarti benar. Ia adalah membenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya, yang diwujudkan dalam pengorbanan materi. dituliskan dalam Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢﴾ (البقرة: ٢٦٧)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁴⁸

8) Pajak (Dharibah)

Dharibah adalah pajak tambahan dalam Islam, yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut ekonomi non Islam.⁴⁹

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 49

⁴⁸*Ibid.*, h. 35

⁴⁹Gusfahmi, *Pajak Menurut...*, h. 30

b. Pengeluaran Negara Islam

Dalam pos pengeluaran negara tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain.

Ada hal-hal yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketidakmampuan menjadi barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional. Di konvensional, terlihat jelas ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah menjadi satu ideologi bahwa penyerahan perekonomian pada pasar akan berakhir pada kesejahteraan rakyat.⁵⁰

Karakteristik dalam sistem islam, paling tidak dibagi dua. Yaitu, karakteristik pengeluaran yang terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah dimana distribusi

⁵⁰Muh. Fudhail Rahman, "Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam". *Jurnal Al-Iqtishad*", Vol. V, No. 2, (Juli, 2013)

pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya : zakat, khumus dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi data yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan manusia yang berhak atas zakat atau yang dikenal mustahiq. Sementara, pengeluaran tidak terikat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.⁵¹

Mengenai pengeluaran negara selama masa pemerintahan Rasulullah Saw secara sistematis digunakan untuk hal-hal tertentu dan tersebut dibawah ini dijelaskan dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1
Pengeluaran Negara Islam

Primer	Sekunder
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan ➤ Penyluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya ➤ Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat negara ➤ Pembayarn upah para sukarelawan ➤ Pembayaran utang negara ➤ Bantuan untuk musafir (dari daerah fadak) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah ➤ Jamuan untuk delegasi keagamaan, utusan suku dan negara serta biaya perjalanan ➤ Hadiah untuk pemerintah negara lain ➤ Pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak ➤ Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin ➤ Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin ➤ Pembayaran tunjangan untuk orang miskin ➤ Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah ➤ Pengeluaran rumah tangga Rasulullah Saw ➤ Persediaan darurat

Sumber : Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

⁵¹ibid.,

3. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan dalam perspektif Islam sesungguhnya memiliki sedikit pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan secara konvensional. Islam mendefinisikan kemiskinan kedalam dua kategori yaitu fakir dan miskin.⁵² Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab *al-faqr*, berarti membutuhkan.

Menurut Al-Ghazali, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri baik dari segi kebutuhan material dan kebutuhan rohani. Argumen tersebut juga dibuat oleh Ahmed, kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh.⁵³ Islam menganggap kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keuangan dan juga masyarakat. Al-Qur'an memberikan peringatan terhadap manusia yang melalaikan kemiskinan, seperti dalam surah:

⁵²An Nissa' Siti khumaira, "Kredit Berbasis Islam dalam Mengentaskan kemiskinan (Studi Kasus: Grameen Bank, Bangladesh)". *Jurnal the Moslem Planners*", 1, (April-Mei, 2013)

⁵³Nurul Huda, et.al, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h.23

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾ (الماعون (١٠٧): ١-٧)

*“1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6. Orang-orang yang berbuat riya, 7. Dan enggan (memberikan) bantuan”.*⁵⁴

Surah Al-Ma'un ayat 1-7 menunjukkan bahwa kemiskinan itu berada semenjak manusia itu ada. Banyak orang mengaku beragama dan shalat tetapi tidak ingin menolong orang-orang yang lemah dan miskin adalah termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Secara implisit pengertian tersebut mengandung makna bahwa kemiskinan dan ketidakmiskinan akan selalu ada agar manusia saling tolong menolong.⁵⁵

Allah sudah memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Ma'un. Dalam sisi *supply*, Allah mengajarkan muslim untuk optimis dalam berusaha mencari rezeki sebagai motivasi meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesabaran sebagai benteng mental

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 483

⁵⁵Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, (Malang: UMM Pres, 2005), h. 353

menghadapi kondisi yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah SWT.

Islam sebagai agama rahmat li al-‘alamin pasti memberi jawaban terhadap permasalahan kemiskinan tersebut. Salah satu pesan nyata yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”*⁵⁶

Salah satu pesan moral yang disampaikan ayat ini adalah hendaklah orang-orang yang hidup saat ini berfikir dan merasa takut jika meninggalkan generasi yang lemah, makna lemah disini bukan hanya dari sisi kecukupan ekonominya saja, namun lebih dari itu, lemahnya intelektual, lemahnya jiwa sosial serta lemahnya keimanan terhadap nilai-nilai agama merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh orang-orang yang hidup saat ini. Semua ini bertujuan agar terciptanya generasi yang memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap peradaban umat yang lebih baik.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 62

Rezeki yang berbeda diberikan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya akan menyebabkan kecemburuan sosial jika dilihat dari segi ekonomi, namun pemberian rezeki yang berbeda jika dilihat dari segi *demand*, Islam mempunyai mekanisme distribusi pendapatan, yaitu dengan zakat. Mekanisme ini sanggup meredam kecemburuan solusi dan mecukupi kebutuhan pokok golongan kelas bawah seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.⁵⁷

b. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural. *Pertama*, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam. *Kedua*, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya. Sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. *Ketiga*, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. *Keempat*, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, borokrasi, dan ekonomi di suatu tangan. *Kelima*, kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana

⁵⁷Muhamad Nur Rohani, "Kemiskinan Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam". *Jurnal Dan Makalah*", Vol. 8, No. 1, (Mei, 2014): 32

alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.⁵⁸

c. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks, ada beberapa indikator kemiskinan antara lain :

- 1) Tingkat Konsumsi Beras. Indikator ini menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita sebagai indikator kemiskinan.
- 2) Tingkat Pendapatan. Terdapat batas pendapatan yang mengkategorikan garis batas kemiskinan.
- 3) Kesejahteraan Rakyat. Terdapat 9 komponen kesejahteraan rakyat yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, kebebasan.⁵⁹

d. Dampak Kemiskinan

Banyak hadis Rasulullah saw. memandang kemiskinan itu bahaya yang sangat mengawatirkan bagi pribadi dan masyarakat, aqidah dan keimanan, akhlak dan perilaku, pemikiran dan budaya, dan keluarga juga bangsa.

⁵⁸Husna Ni'matul Ulya, "Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional". *Jurnal of Islam Economics and Business*", Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni, 2018)

⁵⁹ *Ibid.*,

Yusuf Qarhawi menyebutkan dampak kemiskinan sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan Berbahaya bagi Akidah. Beliau mengatakan bahwa kemiskinan dapat menjadi penyebab utama keraguan seseorang akan kebijakan aturan Allah SWT. kemiskinan banyak menyebabkan seseorang itu menjadi kafir, sehingga tidak heran jika Nabi selalu berlindung kepada Allah dari kemiskinan dan kekafiran.⁶⁰
- 2) Kemiskinan Berbahaya bagi Akhlak dan Perilaku. Kemiskinan itu banyak mendorong pada perilaku atau perbuatan tidak terpuji. Karena itu banyak orang berkata, “Bunyi perut itu lebih dahsyat daripada bunyi hati”.⁶¹
- 3) Kemiskinan Berbahaya Pada Pikiran. Kemiskinan juga berbahaya pada pikiran seseorang, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, berkata: “Jangan minta keputusan kepada orang yang tidak berfikir teliti dirumahnya.” Maksudnya karena orang yang bersangkutan kacau pikirannya, sehingga keputusannya tidak benar. Yang demikian ini karena emosi yang tempramen itu berpengaruh pada kelurusan berpikir dan berpendapat sebagaimana menurut ilmu jiwa.⁶²

⁶⁰Yusuf Qardhawi, *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 12

⁶¹*Ibid.*, h. 14

⁶²*Ibid.*,

- 4) Kemiskinan berbahaya bagi keluarga. Kemiskinan juga berbahaya bagi keluarga, antara lain: bagi pembentukannya, kebutuhannya, dan ketentramannya. Karena itu al-Qur'an berpesan agar para bujangan miskin ini tetap menjaga kesucian diri mereka dan bersabar hingga sampai pada kemampuan ekonomi. Kemiskinan sendiri banyak menyebabkan perceraian, mengganggu keharmonisan bahkan merobek-robek tali kasih.⁶³
- 5) Kemiskinan berbahaya bagi ketentraman masyarakat. Kemiskinan juga berbahaya bagi kedamaian dan ketentraman masyarakat. Selain itu, kemiskinan juga menimbulkan bahaya-bahaya lain terhadap kesehatan umum seperti gizi buruk, tempat tinggal yang tidak layak dan lain-lain. Juga terhadap kesehatan jiwa karena suka dibarengi kegaduhan, kecemasan, dan kebencian. Dalam keadaan seperti itu juga berbahaya terhadap produktivitas, perekonomian dan lain-lain.⁶⁴

e. Solusi Terhadap Kemiskinan

Islam telah menyatakan perang terhadap kemiskinan sebagaimana yang diutarakan oleh Sayyidina 'Ali bin Abi Thalib dan menyerangnya secara habis-habisan untuk menghindari bahayanya terhadap akidah, akhlak, dan prilaku, serta untuk melindungi keluarga

⁶³*Ibid.*, h. 16

⁶⁴*Ibid.*, h. 18-19

dan masyarakat, menjaga ketentraman dan keutuhan serta menjunjung tinggi semangat persaudaraan antar sesama muslim. Untuk menghindari itu semua, islam menawarkan beberapa solusi sebagai berikut :

1) Bekerja (*al- 'Amal*)

Bekerja adalah cara dan senjata pertama dan utama dalam memerangi kemiskinan, bekerja juga dapat dikatakan sebagai upaya pertama dalam memperoleh kekayaan, serta sebagai unsur pertama dalam memakmurkan dunia yang dititipkan oleh Allah dan diperintahkan pula untuk memakmurkannya.

2) Jaminan Hidup dari Kerabat yang Mampu

Meskipun senjata yang paling ampuh dalam memerangi kemiskinan adalah usaha dari diri sendiri dengan cara bekerja, namun menjamin kerabat dekat yang kekurangan merupakan hal yang tidak kalah pokok dalam islam bagi mereka yang tidak mampu untuk bekerja lagi.

3) Zakat

Islam tidak melupakan mereka yang tergolong fakir dan miskin. Allah swt. telah menetapkan hak-hak orang fakir dan miskin dalam harta orang-orang yang terlembaga dalam bentuk zakat. Tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup

orang-orang fakir dan miskin. Masyarakat fakir dan miskin adalah sasaran pertama dari pengeluaran zakat.

4) Jaminan Kas Islam (*Baitul Mal*)

Negara islam sebenarnya mempunyai kekayaan sebagai hak milik umum, yang dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan umum, baik dikelola sendiri, disewakan, atau dikelola bersama pihak lain. Pada dasarnya seluruh pemasukan terhadap kas islam merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat fakir dan miskin. Ketika perolehan dari zakat tidak dapat mencukupi kebutuhan atau permintaan.⁶⁵

B. Tinjauan Umum Ekonomi Konvensional Tentang Kebijakan Fiskal

1. Kebijakan Fiskal

a. Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada ditangan pemerintah dan di wakili oleh Kementrian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

⁶⁵Shidqi Ahyani, "Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Solusinya dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Sa'ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan Kemiskinan)", *Jurnal Kariman*", Vol. 04, No. 01, (2016)

Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut dalam tataran praktisnya dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁶⁶

Menurut Zaini Ibrahim, Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah.⁶⁷

Menurut Rozalinda, Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.⁶⁸

Menurut Sadono Sukirno, adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam

⁶⁶Muara Nangarumba, “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal dan Penyaluran Kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2016”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 8, No. 2, (2016)

⁶⁷Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2013), h. 193

⁶⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 137

pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.⁶⁹

Menurut Mannan, adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara.⁷⁰

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang didalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penrimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik

Adapun instrumen pokok dalam kebijakan fiskal ada dua, yaitu kebijakan perpajakan (*tax policy*) dan kebijakan pengeluaran (*ekspenditure policy*).⁷¹ Penggunaan dua komponen utama tersebut menjadikan kebijakan fiskal dapat menjawab bagaimana penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, dan inflasi.⁷² Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk

⁶⁹Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 170

⁷⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (rev.ed.; Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 123

⁷¹Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 1

⁷²Eti Rochaety, dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 161

pengembangan aspek ekonomi, tetapi juga menerapkan aspek-aspek kebijakan fiskal lainnya seperti perpajakan.

Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka:

- 1) Membantu memperkecil fluktuasi dan siklus usaha;
- 2) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi;
- 3) Membebaskan dari inflasi atau bergejolak.

Ketiga point tersebut terlihat bahwa arah kebijakan fiskal yang secara teori ketika lahir memang diarahkan untuk mengurangi defisit anggaran. Kebijakan fiskal merujuk kepada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.⁷³

b. Fungsi Kebijakan Fiskal

Secara umum fungsi kebijakan fiskal adalah fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

- 1) Fungsi Alokasi mengandung esensi mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan stimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam penerapan fungsi ini kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal.

⁷³Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan...*, h. 2

- 2) Fungsi Distribusi menyangkut sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesenjangan dan mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Untuk mencapai kebijakan fungsi ini, penerapan kebijakan fiskal dapat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara.
- 3) Fungsi Stabilisasi esensinya adalah untuk mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian. Pada fungsi stabilitas beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang memadai.⁷⁴

Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi fungsi stabilitas dari kebijakan fiskal. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.⁷⁵

⁷⁴Hayat Abdullah, "Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital Dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan". *Jurnal Bina Praja*, Vol. 6, No. 2, (Juni, 2014): 117-128

⁷⁵Venti Eka Satya, "Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2013". *Jurnal Kajian*, Vol. 19, No. 2 (Juni, 2014)

c. Jenis Kebijakan Fiskal

Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu:

1) Pembiayaan Fungsional (*The Fungsional Finance*),

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja (*employment*).

2) Pendekatan Anggaran Terkendali (*The Manage Budget Approach*),

Dalam konsep anggaran berdasarkan pendekatan pengelolaan anggaran terkendali, pengeluaran pemerintah, penarikan pajak dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi.

3) Stabilitas Anggaran (*The Stabilizing Budget*)

Konsep stabilitas anggaran disebut stabilitas anggaran otomatis dalam politik fiskal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara otomatis terjadi dengan sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian sedemikian rupa tanpa harus ada ikut campur tangan pemerintah secara langsung yang secara sengaja atau tidak sengaja direncanakan.

4) Pendekatan Anggaran Belanja Berimbang (*Balance Budget Approach*)

Cara yang diberikan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (*managed budged*). Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan kepada keharusan kepada keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Pendekatan ini selalu mempertahankan anggaran belanja yang seimbang.⁷⁶

d. Tujuan Kebijakan Fiskal

Umumnya tujuan yang ingin dicapai kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Artinya, tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum dipihak lain. Dengan kata lain tujuan kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional riil terus meningkat pada laju yang dimungkinkan oleh perusahaan teknologi dan tersedianya faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum.

Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan yang paling utama dari kebijakan fiskal. Selain itu aspek kedua dari

⁷⁶Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan...*, h. 9

kebijakan fiskal adalah mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan, yang didefinisikan sebagai adanya *benefit* maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Sedangkan kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk pengalokasian sumber daya, pencapaian stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai.⁷⁷

Adapun tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due, yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
- 2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
- 3) Untuk menstabilkan harga-harga umum, khususnya mengatasi inflasi.⁷⁸

Dengan kata lain, kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

⁷⁷Muhammad Fauzan, “Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khatab”. *Human Falah*”, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni, 2017)

⁷⁸Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan...*, h.3

rakyat dengan cara menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari ketiga tujuan diatas, dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu mempertahankan kesempatan kerja penuh dan stabilitas harga.⁷⁹

2. Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara

a. Pendapatan Negara

Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat dll.⁸⁰ Dalam hal ini pendapatan negara yaitu berasal dari pajak maupun non pajak. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁸¹

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang

⁷⁹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran...*, h. 257

⁸⁰Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.

⁸¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), h. 1

sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan, dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting yang akan dibiayai pemerintah. Pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.⁸²

Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua sumber yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

1) Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak.

Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang

⁸²Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 168

menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Sedangkan, Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Diantara jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor dan pajak penjualan. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah :

a) Pajak Pusat (wewenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat) diantaranya :

- (1) Pajak Penghasilan (PPh);
- (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- (3) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM);
- (4) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB);
- (5) Bea Materai;
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB);
- (7) Bea Masuk;
- (8) Cukai Tembakau Dan Ethol Alkohol Beserta Hasil Olahannya.

b) Pajak Daerah (Wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah daerah)

(1) Pajak Daerah Propinsi :

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air;

- (b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- (c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air;
- (d) Pajak pengambilan dan Pemanfaat Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

(2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota :

- (a) Pajak Hotel dan Restaurant (PHR);
- (b) Pajak Restoran;
- (c) Pajak Hiburan;
- (d) Pajak Reklame;
- (e) Pajak Penerangan Jalan;
- (f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- (g) Pajak Parkir.⁸³

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pendapatan negara selain dari pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari :

- a) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dan dana pemerintah, (antara lain, penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran rutin).

⁸³Muda Markus, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 3

- b) Penerimaan dan pemanfaatan sumber daya alam (segala kekayaan alam yang terdapat diatas permukaan dan didalam bumi yang dikuasai negara, antara lain royalti dibidang pertambangan).
- c) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (antara lain, dividen atau bagian laba pemerintah dari BUMN, dana pembangunan semesta, dan hasil dari penjualan saham pemerintah dalam BUMN).
- d) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah (antara lain, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan).
- e) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi (antara lain, lelang barang rampasan negara dan denda).
- f) Penerimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah (adalah penerimaan negara berupa bantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah, kecuali hibah dalam bentuk natura yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti

bencana alam atau wabah penyakit yang tidak dicatat dalam APBN).

g) Penerimaan lainnya yang diatur dalam UU tersendiri.⁸⁴

b. Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan kewajibannya, negara akan mengeluarkan uang dari kas negara guna membiayai belanja negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, pengeluaran negara/pemerintah (government expenditure) dibedakan menjadi dua, yaitu : pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok belanja dan pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok pengeluaran pembiayaan.

Belanja negara dibagi menjadi dua bagian yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Transfer ke daerah tidak dimasukkan kedalam kategori belanja pemerintah pusat karena secara otonom dana tersebut akan dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun.⁸⁵

⁸⁴*Ibid.*, h. 493

⁸⁵Minarni, *Falsifikasi Kebijakan...*, h. 96

Berdasarkan klasifikasinya belanja negara dibagi menjadi dua yaitu :

1) Belanja Rutin

Belanja rutin adalah belanja negara untuk pemeliharaan atau untuk penyelenggaraan pemerintah sehingga sifat rutin dilakukan setiap tahun anggaran. Serta bersifat konsumtif yang berarti manfaatnya hanya untuk anggaran yang bersangkutan. Seperti, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Pembayaran Pokok dan Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja lain-lain.

2) Belanja pembangunan

Belanja pembangunan adalah belanja yang tidak bersifat rutin dan tidak bersifat konsumtif tetapi merupakan belanja yang bersifat investasi sehingga manfaatnya di masa yang akan datang. Belanja pembangunan disebut juga belanja proyek. Seperti: Pembiayaan pembangunan rupiah, pembiayaan proyek dan lain-lain.⁸⁶

3. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Berdasarkan UUD No. 24 tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

⁸⁶*Ibid.*, h. 97

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan ,air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.⁸⁷

Menurut Kuncoro kemiskinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Adapun menurut Ginandjar Kartasasmita mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Friedman bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosialnya.⁸⁸

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya. Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk

⁸⁷Abdul Rohman, "Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Desa", *Jurnal Pembangunan Perdesaan*", Vol. IV No. 2, (Agustus, 2004) : 147

⁸⁸Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 2

bisa hidup secara manusiawi. Paket ini terdiri dari komposisi pangan bernilai gizi yang cukup yang sesuai dengan tingkat usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan yang dialaminya serta sandang, papan dan terutama pangan.

Dimensi kemiskinan meliputi beberapa aspek penting yaitu *pertama*, aspek politik yaitu tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka. *Kedua*, aspek sosial yaitu tersingkir dari instusi utama masyarakat yang ada. *Ketiga*, aspek ekonomi yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan dan rendahnya kepemilikan atas aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan dan keempat adalah aspek budaya atau nilai yaitu terperangkap kedalam budaya rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, berpikir pendek dan mudah menyerah.⁸⁹

b. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan :

⁸⁹Lincoln Arsyat, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2015), h.

- 1) Tingkat dan laju pertumbuhan output;
- 2) Tingkat upah netto;
- 3) Distribusi pendapatan;
- 4) Kesempatan kerja;
- 5) Tingkat inflasi;
- 6) Pajak dan subsidi;
- 7) Investasi;
- 8) Alokasi serta kualitas SDA;
- 9) Ketersediaan fasilitas umum;
- 10) Penggunaan teknologi;
- 11) Tingkat dan jenis pendidikan;
- 12) Kondisi fisik dan alam;
- 13) Politik;
- 14) Bencana alam;
- 15) Peperangan.⁹⁰

c. Indikator Kemiskinan

Menurut BPS, ada beberapa indikator kemiskinan :

- 1) Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan

⁹⁰Muhdar HM, "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia : Masalalu dan Solusi", *Jurnal Al – Buhuts*", Vol. 11, No. 1 (Juni, 2015) : 42-66

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

2) Garis Kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rumus Penghitungan :⁹¹

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

3) Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-PO) adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (GK).

4) Indeks kedalaman kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

5) Indeks keparahan kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.⁹²

⁹¹Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 05 April 2019 pada jam 08.36 WIB

⁹²*Ibid.*,

d. Macam-macam Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan macam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan dan ketimpangan standar kesejahteraan.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat

yang relatif tidak mau memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.⁹³

Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah kemiskinan Alamiah dan Kemiskinan Buatan.

a) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan

⁹³Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi...*, h. 796

masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan dimana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.⁹⁴

e. Dampak Kemiskinan

Dari sekian faktor penyebab yang telah dipaparkan, memunculkan suatu permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Dari satu permasalahan sosial saja yakni kemiskinan dapat memunculkan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Kemiskinan memberikan dampak sosial yang beraneka ragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tindakan-tindakan kriminal yang marak terjadi kebanyakan dilatar belakangi oleh motif ekonomi yakni ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

⁹⁴Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen, Een N. Walewangko, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara". *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*", Vol. 19, No. 7 (2018)

Selain maraknya tindak kriminal, kondisi kesehatan masyarakat yang buruk juga merupakan salah satu dampak adanya kemiskinan. Berikut rincian dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan :

- 1) Banyaknya pengangguran.
- 2) Terciptanya perilaku kekerasan. Ketika seseorang tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal ketika mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan
- 3) Banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah atau pendidikan
- 4) Susah mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak berobat. Sehingga, mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak⁹⁵

f. Solusi Terhadap Kemiskinan

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan :

- 1) Memperluas Lapangan Kerja

Cara ini yang cukup ampuh dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada dengan cara mengurangi jumlah tingkat pengangguran

⁹⁵Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1999), h. 20

yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi di setiap wilayah tertentu, dimana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu dalam memenuhi jumlah pelamar kerja agar sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia.

2) Memberikan Bantuan Pendidikan secara Gratis

Pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping itu, pemerintah juga perlu memberikan keringanan biaya iuran bulanan sekolah kepada siswa yang orang tuanya merasa kurang mampu. Dengan itu, masalah putus sekolah dapat diatasi sehingga pada suatu saat nanti siswa yang telah lulus tersebut dapat leluasa mencari pekerjaan karena dia telah memiliki kemampuan dan keterampilan di dunia kerja.

3) Memberikan Fasilitas yang memadai dan Subsidi Gratis

Pemerintah sebaiknya membantu dalam memberi fasilitas yang merata di setiap wilayah. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai kurang atau masih belum cukup keberadaanya. Setelah fasilitas terpenuhi, diharapkan masyarakat dapat hidup dengan layak dan sejahtera.

4) Melakukan Hal Yang Inovatif dan Kreatif

Kegiatan ini dapat berupa hal-hal yang inovatif dan kreatif, seperti membuat kerajinan dari barang bekas. Hasil karya yang diperoleh dari kerajinan itu, dapat kita jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5) Membuka Lapangan Kerja Sendiri

Dalam usaha mencegah kemiskinan, kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri. Jika kita membuka usaha, maka akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja berbagai penggerak jalan suatu usaha tersebut. Dengan cara inilah, pengangguran yang merupakan faktor utama kemiskinan dapat dikurangi jumlahnya.⁹⁶

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Beberapa diantaranya yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.⁹⁷

⁹⁶Atma Ras, "Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Socius*, Vol. XIV, (Oktober-Desember, 2013)

⁹⁷Mohammad Mulyadi, "Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan dan Kesenjangan", *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial*, Vol. X, No. 09, (2018)

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. **Muhammad Fauzan**, dengan judul kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam di masa Khalifah Umar bin Al-Khathab, pada tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu analisis deskriptif yang menggambarkan keseluruhan biografi Umar bin Al-Khathab dan dilemma Umar bin Al-Khathab secara ekonomi, terutama dalam hal kebijakan fiskal. Data tentang kebijakan Umar bin Al-Khathab dalam hal ekonomi, terutama dalam hal kebijakan fiskal dilacak dalam karya ulama, penelitian dan sejarawan yang menulis tentang Umar bin Al-Khathab. Sedangkan data yang berkaitan dengan penelitian ini ditelusuri dalam sumber studi sekunder dan tersier serta penelitian sebelumnya. Setelah data berhasil dikumpulkan, dikelompokkan, dikategorikan, dan dibuang data-data yang tidak perlu diperoleh akan dianalisis secara cermat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan (ketekunan) ekonomi yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khathab adalah kebijakan (ketekunan) yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Umar bin Al-Khathab berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, atau ketekunan Umar bin Al-Khathab atau teman pada saat itu.⁹⁸

⁹⁸Muhammad Fauzan, "Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab". *Human Falah*", Vol. 4, No. 1, (Januari,2017)

2. **Anisa Dwi Aprilia, Darsono, Agustono**, dengan judul analisis pengaruh fiskal dan moneter terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia, pada tahun 2017. Metode dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* (sengaja) di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2000 hingga 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, pengeluaran pemerintah sektor pertanian, suku bunga dan jumlah uang beredar secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Penerimaan perpajakan dan jumlah uang yang beredar secara parsial berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia, sedangkan penerimaan bukan pajak, pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan suku bunga secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia.⁹⁹
3. **Nurma Sari**, dengan judul zakat sebagai kebijakan fiskal pada masa kekhalifhan Umar bin Khattab, pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah menggunakan pendekatan sejarah sosial dengan menjadikan kehidupan sosial-ekonomi pada masa ke Khalifahan Umar

⁹⁹Anisa Dwi Aprilia, Darsono, Agustono, "Analisis Pengaruh Fiskal Dan Moneter Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Di Indonesia". *Agrista*, Vol. 4, No. 3, (September, 2016): 320-238

bin Khathab, khususnya berkaitan dengan penerapan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal sebagai unit analisis (*unit of analysis*). Data dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal pada masa awal islam. Disamping sebagai sumber pendapatan negara islam yang utama pada masa itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran Negara baik dalam bentuk *government expenditure* (pengeluaran belanja negara) maupun *government transfer* (pengeluaran transfer). Zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis.¹⁰⁰

¹⁰⁰Nurma Sari, "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifhan Umar Bin Khatthab". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*", Vol. 1, No. 2, (September, 2015)

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Profil Negara Indonesia

1. Profil Negara Indonesia

Republik Indonesia (RI), umumnya disebut Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara, dengan populasi hampir 270.054.853 jiwa pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang terpilih secara langsung.¹⁰¹

Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

¹⁰¹Salman Munthe, "Strategi Implementasi Sistem Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 2, (September, 2015)

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti oleh para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kegiatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjajahan samudra. Setelah berada dibawah penjajahan Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman, dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi, dan periode perubahan ekonomi yang pesat.¹⁰²

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa (ras), Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan/Austronesi dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku yang tersebar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, “*Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda namun tetap satu)”, berarti

¹⁰²*Ibid.*,

keragaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati yang terbesar kedua di dunia.¹⁰³

2. Posisi dan Letak Geografis

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni yang menyebar disekitar khatulistiwa, dan memiliki iklim tropis. Secara geografis Indonesia terletak diantara 6° LU (Lintang Utara) - 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) - 141° BT (Bujur Timur) serta terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Benua Australia/Oseania.¹⁰⁴ Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, dimana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km².¹⁰⁵

¹⁰³*Ibid.*,

¹⁰⁴Julismin, "Dampak dan Perubahan Iklim di Indonesia".*Jurnal Geografi*", Vol. 5, No. 1, (2013)

¹⁰⁵*Ibid.*,

Indonesia secara *de facto* terdiri dari 34 provinsi setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012. Hal ini juga menjadikan Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia. Secara *de facto*, terdapat 5 provinsi yang memiliki status berbeda dibandingkan provinsi lain. Provinsi tersebut yaitu Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Papua dan DKI Jakarta. Kelima provinsi tersebut memiliki hak istimewa legislatur yang lebih tinggi dan tingkat otonominya lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.¹⁰⁶

3. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan perekonomian dan perkembangan bangsa. Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batubara, emas dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perekebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62% dan lainnya sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km.¹⁰⁷ Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis serta deposit sumber daya alamnya yang

¹⁰⁶<https://setjen.pu.go.id>, diakses pada 13 Juli 2019 pada jam 19.30 WIB

¹⁰⁷Donny Juliandri Prihadi, "Keberadaan Ikan Kodok (*Antennarius maculates*, Desjardins 1840) di Pulau Nusa Penida Provinsi Bali". *Jurnal Akuatika*", Vol. 6, No. 2, (September, 2015): 187-197

melimpah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang sangat baik dalam hal kekayaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Salah satu jenis sumber daya non hayati adalah sumber mineral, yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.¹⁰⁸

Populasi peternakan di Indonesia terdiri atas populasi ternak besar seperti, sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda. Populasi ternak kecil meliputi : kambing, domba, dan babi. Sementara populasi ternak unggas terdiri dari ayam kampung, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik. Diantara hasil ternak saat ini memiliki prospek ekspor adalah kulit olahan (disamak).¹⁰⁹

Berdasarkan fungsinya, hutan Indonesia dibagi menjadi empat jenis, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata. Produksi kehutanan berupa kayu hutan, baik kayu bulat kayu gergajian maupun kayu lapis. Dari hasil hutan tersebut, yang sekarang ini menjadi produk andalan Indonesia untuk kegiatan ekspor adalah kayu lapis.¹¹⁰

¹⁰⁸Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 1

¹⁰⁹<https://www.bappenas.go.id>, diakses pada 09 Mei 2019 pada jam 17.21 WIB.

¹¹⁰<https://www.bappenas.go.id>, diakses pada 09 Mei 2019 pada jam 17.21 WIB.

Fakta fisik bahwa dua per tiga wilayah Indonesia berupa laut, maka sumber daya alam di laut memiliki potensi yang sangat besar. Selain mengandung minyak, gas mineral, dan energi laut non-konvensional, serta harta karun yang sudah mulai digali meskipun masih terbatas, laut juga menghasilkan ikan yang potensi lestarnya diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Saat ini yang baru dimanfaatkan sekitar 70%. Pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan dikelompokkan dalam lima industri kelautan, yaitu industri perikanan, industri mineral dan energi laut, industri maritim, termasuk industri galangan kapal, industri pelayaran (transportasi laut), dan industri pariwisata (wisata bahari dan kawasan konservasi). Saat ini yang menjadi andalan ekspor perikanan Indonesia adalah udang dan tuna.¹¹¹

Sebagian besar lahan perkebunan yang luas di Indonesia menghasilkan komoditas pertanian atau hasil bumi untuk diperdagangkan. Indonesia adalah salah satu dari tiga negara penghasil terbesar karet di dunia, terbesar ketiga penghasil kopi, dan salah satu penghasil utama untuk kelapa, tembakau, kakao, dan rempah-rempah.¹¹²

Selain sektor pertanian dan ekspor bahan mentah yang mendominasi kegiatan ekonomi, Indonesia pun menjadi negara industri dalam 35 tahun terakhir. Beberapa diantara industri besar di Indonesia

¹¹¹<https://www.bphn.go.id>, diakses pada 09 Mei 2019 pada jam 17.30 WIB

¹¹²Sony Hendra Permana, "Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia". *Aspirasi*", Vol. 8, No. 1, (Juni, 2017)

adalah industri pengelolaan besi, minyak, kayu dan mebel, produk kimia, semen, kaca dan produk berbahan dasar karet, mesin dan pupuk. Sebagian industri itu langsung dikontrol oleh pemerintah yaitu kegiatan usaha yang disebut BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Indonesia juga berusaha mengembangkan industri berteknologi tinggi, seperti barang-barang elektronik dan pesawat terbang. Industri tekstil juga dikembangkan dalam skala besar, termasuk diantaranya industri batik, yaitu kain yang diberi motif khas Indonesia, baik dengan teknik tradisional (batik tulis) maupun dengan cetak modern (batik cetak).¹¹³

4. Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Oeng Repoeblik Indonesia (ORI) yang menjadi mata uang pertama Repubik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah.¹¹⁴

Pada masa Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadopsi sistem ekonomi kapitalis, melainkan memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak.

¹¹³www.kemenperin.go.id, diakses pada 09 Mei 2019 pada jam 18.12 WIB.

¹¹⁴Bambang Wahyudi, *Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, (Purwokerto: Vigi Bless Publisher, 2018), h. 119

Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi negara.¹¹⁵

Pemerintah Orde baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, mestabilkan mata uang, penjadwalan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing. Pada era tahun 1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7% antara tahun 1968 sampai 1981. Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali, selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997.¹¹⁶

Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu, yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Dibulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dan di bawah Presiden BJ

¹¹⁵*Ibid.*,

¹¹⁶*Ibid.*,

Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.¹¹⁷

Pada tahun 2010 ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihi Rp. 6.300 triliun meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat diantara 20 negara anggota Industri ekonomi terbesar di dunia.¹¹⁸

Indonesia mempunyai sumber daya alam besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia mengekspor gas alam terbesar kedua di dunia, meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimporan bersih minyak mentah. Hasil pertanian yang utama yang termasuk yaitu, beras, teh, kopi, rempah-rempah dan karet.¹¹⁹

¹¹⁷*Ibid.*,

¹¹⁸Bambang Wahyudi, *Indonesia Dalam...*, h. 120

¹¹⁹Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, "Tingkat Keterbukaan Ekonomi di Negara ASEAN-5". *Jurnal NeO-Bis*", Vol. 10, No. 1, (Juni, 2016)

B. Kebijakan Fiskal Indonesia Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Dana Desa

Kebijakan fiskal Indonesia tahun 2018 menunjukkan pengelolaan fiskal dengan prinsip prudent, peningkatan aktivitas perekonomian serta dukungan pemerintah pada produktivitas ekonomi nasional. Pengelolaan fiskal yang prudent tercermin dari tingkat defisit dan utang yang terus terjaga rendah.¹²⁰ Tingkat defisit APBN dan keseimbangan primer bahkan berada pada posisi terbaik sejak 2013 yang menunjukkan dukungan APBN pada stabilitas di tengah gejolak perekonomian global. Tercapainya kondisi tersebut didukung oleh terus meningkatnya kinerja penerimaan negara yang merupakan hasil dari kombinasi perbaikan aktivitas perekonomian serta perbaikan sistem penerimaan negara.¹²¹ Selanjutnya realisasi belanja negara juga terus menunjukkan perbaikan dibanding periode sebelumnya yang mencerminkan dorongan fiskal pada perekonomian khususnya pada kegiatan produktif seperti infrastruktur serta perlindungan sosial.¹²²

¹²⁰<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 05 Juli 2019 pada jam 03.55 WIB

¹²¹<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 04 Juli 2019 pada jam 17.43 WIB.

¹²²<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 05 Juli 2019 pada jam 03.50 WIB.

Tabel 3.1
RINGKASAN APBN 2014-2018
(Triliun Rupiah)

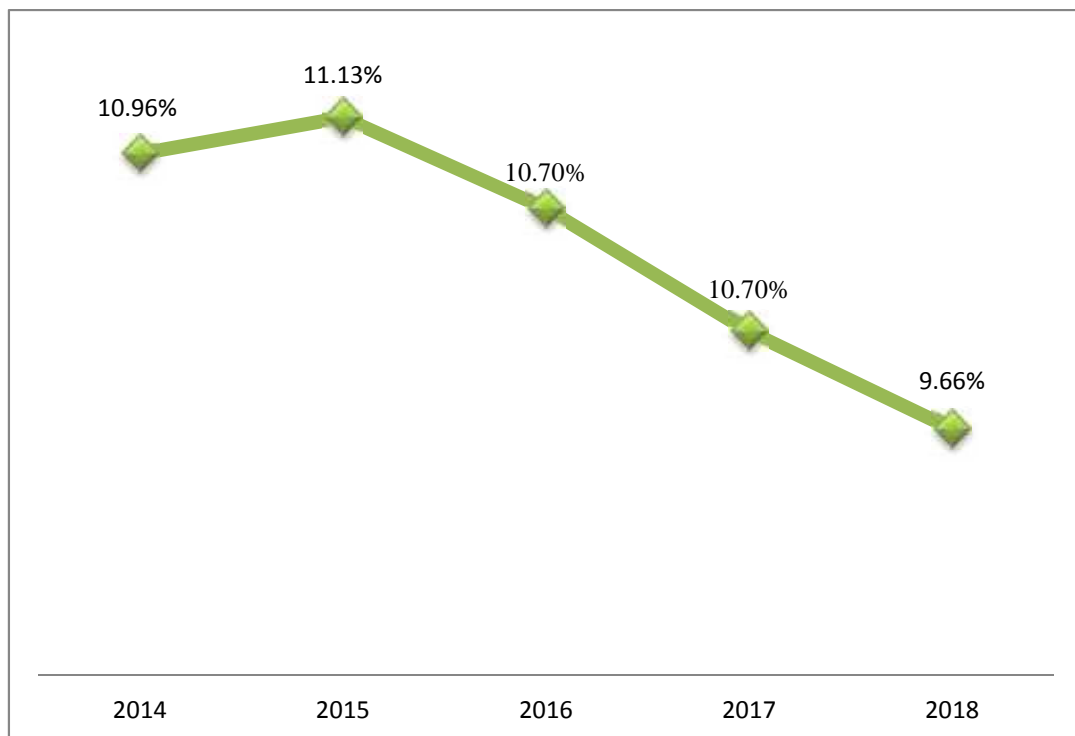
URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
A. PENDAPATAN NEGARA	1.667,1	1.793,6	1.822,5	1.750,3	1.894,7
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.665,8	1.790,3	1.820,5	1.748,9	1.893,5
1. Penerimaan Perpajakan	1.280,4	1.379,9	1.546,7	1.498,9	1.618,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	385,4	410,3	273,8	250,0	275,4
II. PENERIMAAN HIBAH	1,4	3, 25	2,0	1,4	1, 2
B. BELANJA NEGARA	1.842,5	2.039,5	2.095,7	2.080,5	2.220,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.249,9	1.392,4	1.325,6	1.315,5	1.454,5
II. TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA	637,8	647,0	770, 2	764,9	766, 2
1. Transfer Daerah	592,6	637,9	723,3	704,9	706, 2
2. Dana Desa		20,8	46,9	60,0	60,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(54,1)	(93,9)	(88, 2)	(109,0)	(87,3)
D.SURPLUS / (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(175,4)	(245,9)	(273, 2)	(330, 2)	(325,9)
%SURPLUS/(DEFISIT) TERHADAP PDB	(1,96)	(2, 21)	(2, 2)	(2,41)	(2,19)

Sumber : *Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2018*

Pendapatan negara dalam kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,4 persen per tahun. Secara nominal realisasi pendapatan negara meningkat dari 1.667,1 triliun pada tahun 2014 menjadi 1.894,7 triliun pada tahun 2018. Peningkatan tersebut antara lain dikarenakan adanya lonjakan penerimaan perpajakan sebagai dampak dari program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dan

pemberian beberapa paket insentif fiskal, kenaikan harga minyak mentah, serta kemajuan reformasi perpajakan yang terus berjalan.¹²³

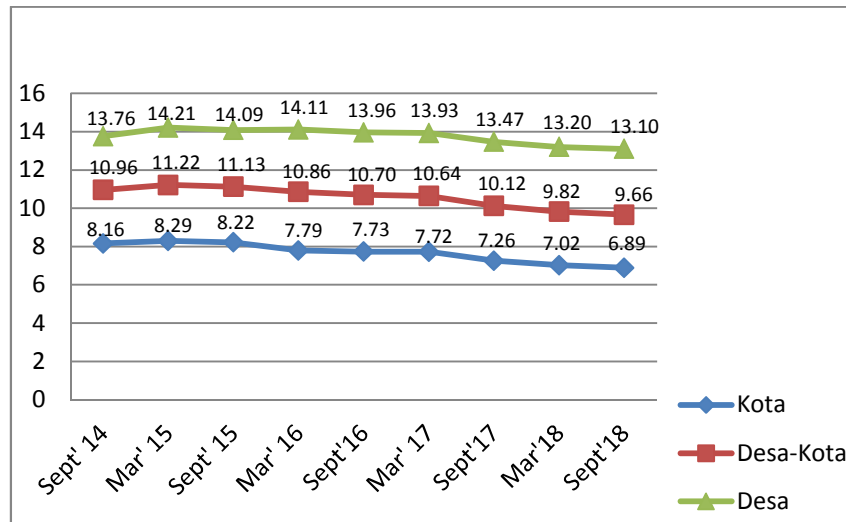
Grafik 3.1
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 2014-2018 (Persen)



Sumber : *Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2019*

¹²³www.kemenkeu.go.id, diakses pada 16 Mei 2019 pada jam 20.54 WIB.

Grafik 3.2
Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan
Tahun 2014-2018 (Persen)



Sumber : *Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2019*

Kemiskinan di Indonesia terus mengalami perbaikan. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Pada akhir tahun 2018 angka kemiskinan secara total berhasil ditekan berada dibawah dua digit, yaitu menjadi 9,66%. Secara lokasi tempat kemiskinan ternyata berada di wilayah pedesaan. Itu artinya, konsentrasi mengatasi kemiskinan harus lebih fokus di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan dan program. Salah satu upaya yang sedang dilaksanakan adalah melalui Alokasi Dana Desa.

Pengentasan kemiskinan melalui kinerja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang didorong oleh sikap akuntabel dan berbasis kinerja. Secara umum penyerapan TKDD masih belum optimal, namun demikian upaya

untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal tetap berlanjut yang diharapkan dapat memperkuat fondasi yang dapat meningkatkan pengelolaan kas di daerah lebih optimal (meminimalisir *idle money*), penguatan tata kelola (*good governance*) serta mendorong penyaluran yang berbasis kinerja.¹²⁴ Realisasi TKDD telah mencapai Rp 501,33 triliun atau 65,43 persen dari pagu APBN 2018. Secara lebih rinci Transfer ke Daerah tercatat sebesar Rp 465,07 triliun (65,85 persen dari APBN), dan Dana Desa sebesar Rp 36,25 triliun (60,41 persen dari APBN).¹²⁵ Meskipun begitu, realisasi tersebut tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan periode tahun lalu. Hal tersebut terutama terkait rendahnya Dana Bagi Hasil dengan realisasi sebesar Rp 45,8 triliun (51,3 persen terhadap APBN), atau tumbuh negatif sebesar 10,4 persen dibanding periode yang sama tahun 2017. Penyebab kondisi tersebut adalah dikarenakan perubahan persentase mekanisme penyaluran dari 25 persen tahun lalu, menjadi sebesar 20 persen. Kontributor pada penurunan realisasi TKDD juga adalah realisasi Dana Insentif Daerah yang tumbuh negatif sebesar 28,5 persen yang dipicu oleh keterlambatan penyampaian dokumen dari pihak pemerintah daerah. Dengan alasan serupa, realisasi Dana Desa juga tercatat tumbuh negatif sebesar 0,8 persen, atau terserap sebesar Rp 36,2 triliun (60,4 persen terhadap APBN).¹²⁶

¹²⁴<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 02 Juli 2019 pada jam 17.30 WIB.

¹²⁵<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 05 Juli 2019 pada jam 04.10 WIB.

¹²⁶*Ibid.*,

Pada sisi lain dalam konteks untuk mewujudkan kesejahteraan, target yang ditetapkan pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi pada level yang sehat pada kisaran 5,3 persen. Perluasan kesempatan kerja dengan mendorong penurunan pengangguran menjadi berkisar 4,8-5,2 persen kemiskinan berkisar 8,5-9,5 persen dan gini ratio sebesar 0,38-0,39 serta IPM sebesar 71,98.¹²⁷

Gambar 3. 1
Perkembangan Subsidi
Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)
***Pertumbuhannya (%)**



Sumber : *Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2019*

Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi 40 persen penduduk termiskin belanja perlindungan sosial dan subsidi terus dipertajam. Pemerintah tetap membantu kelompok miskin 40 persen terbawah dengan tetap mempertahankan subsidi sebesar Rp 224,3 triliun yang terdiri dari subsidi energi dan subsidi non energi seperti subsidi pangan, pupuk, Bahan Bakar

¹²⁷<http://www.anggaran.kemenkeu.go.id>, diakses pada 02 Juli 2019 diakses pada jam 18.00 WIB.

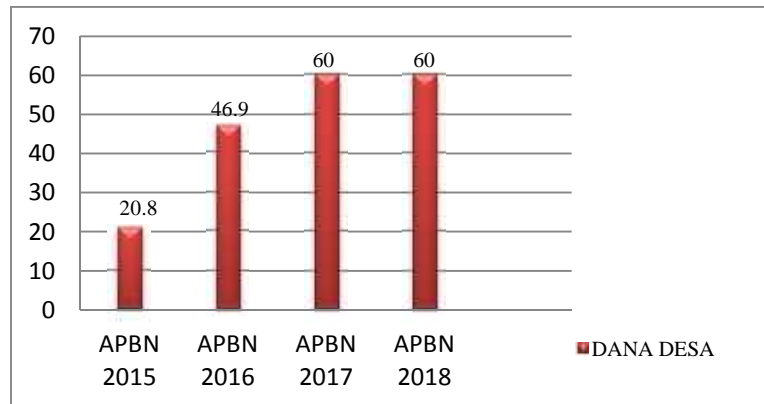
Minyak (BBM), dan listrik. Subsidi Rp 224,3 triliun (rupiah) terdiri dari subsidi energy Rp 160,0 triliun dan subsidi non energi Rp 64,3 yaitu subsidi pangan dan subsidi pupuk Rp 29,5 triliun. Kemudian Rp 100,7 triliun untuk BBM dan LPG 3 kilo, dan subsidi listrik Rp 59,3 triliun. Ini adalah untuk subsidi 450 VA (Volt Amper) untuk 23,2 juta pelanggan dan 900 Volt Amper untuk 6,1 juta pelanggan. Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) sebesar Rp 20,8 triliun untuk 15,6 juta keluarga dengan perbaikan penyaluran, dan subsidi bunga sebesar Rp 16,7 triliun untuk kredit usaha kecil dan mikro, dan perumahan. Kebijakan subsidi diarahkan agar lebih tepat sasaran dan menuju sistem penyaluran non-tunai.¹²⁸

Dana Desa merupakan salah satu bentuk implementasi dari program Nawa Cita pada cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Manfaat dana desa adalah mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dana Desa diharapkan menjadi langkah strategis dalam upaya percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan desa yang diharapkan dapat mendorong pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019.¹²⁹

¹²⁸<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 31 Juli 2019 pada jam 07.51 WIB.

¹²⁹<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 04 Juli 2019 pada jam 14.05 WIB.

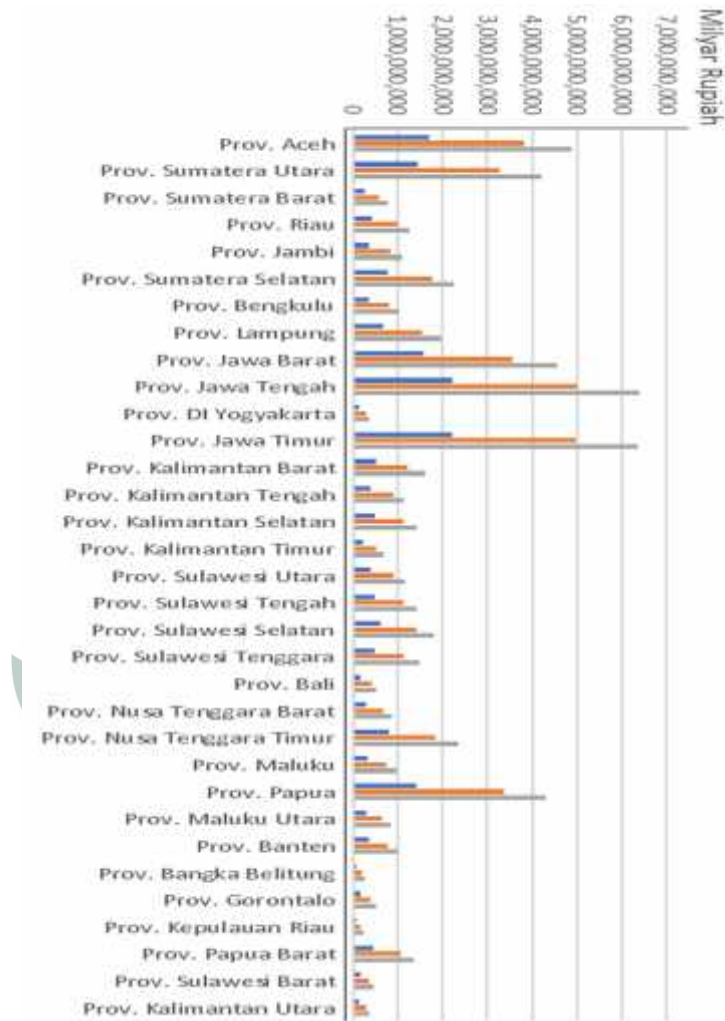
Grafik 3.3
Dana Desa dalam APBN
Tahun 2015 – 2018 (Triliun Rupiah)



Sumber : *Kementerian Keuangan(Kemenkeu) Tahun 2018*

Dana Desa yang telah dialokasikan dalam APBN sejak tahun 2015 sebesar Rp 20,8 triliun, dan terus meningkat hingga Rp 60 triliun pada tahun 2018, merupakan wujud komitmen pemerintah atas amanah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam menyediakan salah satu sumber pendapatan bagi Desa. Dengan demikian, kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kewenangannya.

Gambar 3.2
Perkembangan Dana Desa di Setiap Provinsi
Tahun 2015-2017 (Miliar Rupiah)



Sumber : *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)*

Tahun 2018

Dana desa yang diberikan di tiap provinsi memiliki jumlah yang berbeda-beda dikarenakan pagu dan transmisi kebijakannya disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin serta

tingkat kesulitan geografis berbeda pula di tiap provinsinya. Dalam kurun waktu tiga tahun pertama dana desa diberikan ditiap desa tiap provinsi diluar dana transfer daerah, terdapat provinsi dengan jumlah pemberian dana desa tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah pemberian dana desa terendah.

Pada gambar 3.2 diatas menunjukkan bahwa provinsi tersebut ialah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan terakhir Provinsi Papua. Dana terbesar diberikan oleh kelima provinsi tersebut disebabkan oleh besarnya anggaran yang diajukan dari kelima provinsi tersebut tiap tahunnya sehingga jumlah dana desa yang diturunkan lebih besar dibanding provinsi lain. Sedangkan desa terkecil diberikan pada lima provinsi yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.

Dalam implementasinya, kebijakan Dana Desa yang telah berjalan selama tiga tahun (tahun 2015-2017) masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dihadapi antara lain : Pertama, formulasi distribusi pengalokasian Dana Desa dengan formula Alokasi Dasar (AD) dibandingkan Alokasi Formula (AF) sebesar 90:10 dinilai masih belum berkeadilan karena porsi alokasi formula (AF) yang mencerminkan kondisi

desa hanya sebesar 10 persen sedangkan porsi 90 persen adalah alokasi dasar (AD) yang dibagi rata per desa.¹³⁰

Hal tersebut dapat dilihat dari korelasi distribusi dana desa dengan jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang menunjukkan bahwa distribusi Dana Desa menggambarkan adanya ketimpangan distribusi di level desa. Desa-desa yang berpenduduk miskin tinggi justru mendapatkan Dana Desa yang relatif sama atau lebih kecil dibandingkan dengan desa yang jumlah penduduk miskinnya lebih rendah.

Demikian pula halnya dengan korelasi distribusi dana desa dengan tingkat kesulitan geografis desa yang menunjukkan bahwa desa-desa dengan tingkat kesulitan geografis tinggi justru mendapatkan Dana Desa yang relatif sama atau lebih kecil dibandingkan dengan desa yang tingkat kesulitan geografisnya lebih rendah. Kedua, dalam implementasi di lapangan masih ditemui beberapa kendala, mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran di desa, penyaluran, pemanfaatan, pendamping desa, pengelolaan keuangan desa, monitoring dan pengawasan, hingga aspek sumber daya manusia di daerah. Perbaikan formula distribusi Dana Desa dan pelaksanaannya di lapangan perlu dilakukan agar manfaat Dana Desa dalam percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan desa dapat lebih optimal.

¹³⁰*Ibid.*,

Pemanfaatan Dana Desa selama periode 2015-2017 menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen masih banyak digunakan untuk prioritas pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, embung, dan lainnya. Namun demikian, *multiplier effect*-nya belum berdampak optimal bagi peningkatan perekonomian desa, serta masyarakat desa masih belum merasakan manfaat besar terutama dalam meningkatkan kesejahteraan desa.

Sementara itu, pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa masih belum optimal, padahal banyak desa yang mempunyai kegiatan ekonomi kreatif desa yang dapat didorong untuk menjadi mata pencaharian bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Desa ke depan perlu lebih diarahkan untuk penguatan pada kegiatan yang bersifat padat karya (swakelola) masyarakat desa, pengembangan potensi ekonomi desa melalui kegiatan ekonomi kreatif, dan mengoptimalkan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa diharapkan menjadi akselerator bagi tumbuhnya sentra-sentra kegiatan ekonomi baru di desa serta dapat mendorong kreatifitas dan komitmen masyarakat desa dalam membangun desanya. Potensi dan karakteristik desa dapat menjadi salah satu acuan dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa, misalnya: bagi desa dengan karakteristik tertinggal dan sangat tertinggal diutamakan untuk sarana prasarana infrastruktur dasar, penyediaan layanan dasar publik, dan pemberdayaan

masyarakat, sedangkan bagi desa dengan karakteristik desa berkembang, diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan perekonomian desa.¹³¹

Total Dana Desa dari APBN yang dialokasikan sebesar Rp 127,75 triliun selama tahun 2015-2017 telah menghasilkan output Dana Desa berupa penyediaan sarana prasarana infrastruktur dasar, penyediaan layanan dasar publik di desa, serta pengembangan perekonomian desa. Kinerja Dana Desa dinilai telah memberikan manfaat positif bagi pembangunan desa sehingga diharapkan dapat mengatasi kesenjangan maupun mengurangi kemiskinan desa, meskipun demikian optimalisasi pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan.¹³²

Sementara itu, kinerja indikator kemiskinan perdesaan tahun 2015-2017 mulai membaik sejak Dana Desa mulai diimplementasikan tahun 2015. Tingkat kemiskinan perdesaan menurun yaitu dari 14,2 persen (tahun 2015) menjadi 13,9 persen (tahun 2017). Seiring dengan membaiknya kinerja indikator kemiskinan desa dan ketimpangan antar desa tersebut maka mengindikasikan bahwa program pemerintah salah satunya Dana Desa dinilai memberikan manfaat positif dalam mengurangi kemiskinan dan

¹³¹*Ibid.*,

¹³²<https://fiskal.kemenkeu.go.id>, diakses pada 03 Juli 2019 pada jam 16.26 WIB.

ketimpangan di tingkat desa walaupun signifikansi dampaknya belum dapat diukur dalam tiga tahun pelaksanaan Dana Desa.¹³³



¹³³*Ibid.*,

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Kebijakan Fiskal Indonesia Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pemerintah Indonesia sudah membuat program dalam mengatur kebijakan fiskal Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan yaitu melalui kinerja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) namun dalam aplikasinya masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dari hanya 65,85 % dan dana desa hanya terserap hanya 60,41% pada tahun 2018.¹³⁴ Kunci utama dalam peningkatan penyerapan dana desa diantaranya daya saing kualitas SDM, mengejar ketertinggalan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, penguatan ekspor, mendorong ketahanan pangan dan energi, efektivitas program perlindungan sosial sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin yang tersisa kurang lebih 40%, pemerintah Indonesia terus mempertajam belanja perlindungan sosial dan subsidi. Penyaluran dana APBN sebesar 40% tersebut rencananya berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) seperti perbaikan penyaluran/distribusi atau subsidi bagi usaha mikro. Sedangkan yang lain dalam bentuk subsidi energi berupa BBM dan LPG, Subsidi listrik, pupuk, *public service obligation* (PSO) dan subsidi bunga kredit program direncanakan.

¹³⁴<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 05 Juli 2019 pada jam 04.10 WIB.

Semua bentuk subsidi tersebut memang direncanakan agar dana desa yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dapat terealisasi 100%. Namun dalam implementasi 3 tahun terakhir (2015-2017) kebijakan dana desa masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari korelasi distribusi dana desa dengan jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang menunjukkan adanya ketimpangan distribusi di level desa. Desa-desanya yang berpenduduk miskin tinggi justru mendapatkan dana desa yang relative sama atau malah lebih kecil dibandingkan dengan desa yang jumlah penduduk miskinnya lebih rendah.

Dana desa yang diberikan di tiap provinsi memiliki jumlah yang berbeda-beda dikarenakan pagu dan transmisi kebijakannya disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin serta tingkat kesulitan geografis berbeda pula di tiap provinsinya. Dalam kurun waktu tiga tahun pertama dana desa diberikan ditiap desa tiap provinsi diluar dana transfer daerah, terdapat provinsi dengan jumlah pemberian dana desa tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah pemberian dana desa terendah.

Implementasi di lapangan masih ditemui beberapa kendala, mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran di desa, penyaluran, pemanfaatan, pendamping desa, pengelolaan keuangan desa, monitoring dan pengawasan, hingga aspek sumber daya manusia di daerah. Perbaikan formula distribusi dana desa dan pelaksanaannya di lapangan perlu dilakukan agar manfaat dana desa dalam percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan desa dapat

lebih optimal. Data kemiskinan dari tahun 2014-2018 mulai mengalami penurunan dari 10.96% (tahun 2014) menjadi 9.66% (tahun 2018).¹³⁵

Dalam perspektif ekonomi Islam kemiskinan adalah konsep integral yang terdiri atas aspek moral (budaya dan spiritual) dan aspek material. Sehingga makna kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya melihat dari faktor ekonomi tetapi melainkan juga dari faktor spiritual. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam adalah kewajiban negara atas rakyatnya untuk melayani dan mengurus urusan umat. Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... (رواه البخارى)

*“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya. . .” (H.R. Bukhori).*¹³⁶

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara dana desa dan peran pemimpin. Dimana negara membutuhkan peran seorang pemimpin yang amanah dalam mengimplementasikan dana desa. Peran seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi yang ada, apalagi pemimpin yang mempunyai karisma yang kuat untuk membangun desanya

¹³⁵<http://www.bappenas.go.id>, diakses pada 14 September 2019 pada jam 21.34 WIB

¹³⁶ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab: Shalat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadist : 844 (Berikut: Dar as-Sa'bu, t.t), 139. Ngilim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, Cet. VII (Jakarta: Sumber Wijaya, 1992), h. 49

kearah yang baik, bukan hanya itu saja pemimpin harus professional dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan.

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi yang ada pada saat ini tidak bisa dihindari dan hal itu harus ditunjang dengan adanya kekuatan kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti : pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja yang dapat diandalkan dan terampil di bidangnya, akan menjadi suatu kualitas sendiri yang mempunyai hasil pekerjaan yang bermutu, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam.

Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam meliputi pembangunan yang berdasarkan Islam, keadilan yang meliputi ekonomi yang merata, sumber daya manusia (SDM) yang memakmurkan dan bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang diamanahkan kepadanya serta mensucikan manusia dalam hubungan dengan Allah, sesamanya dan alam lingkungan.

Jadi fokus utama pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam ini adalah pembangunan ekonomi yang bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral dan material yang ditujukan pada manusia dan lingkungannya atas dasar hukum Allah SWT. Pendekatan konsep ekonomi Islam ini juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara.

Manusia adalah subjek dan objek dari pembangunan. Kualitas dari sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan tingkat pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius oleh bangsa, apalagi esensi atau aspek kemajuan dari suatu bangsa di dunia adalah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa atau negara tersebut.

Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari ekonomi. Bentuk-bentuk dari faktor tersebut adalah : (1) Sumber daya yang dapat dikelola (*invistible resources*), (2) Sumber daya manusia (*human resources*), dan Wirausaha (*entrepreneurship*), dan (3) Teknologi (*technology*).¹³⁷ Kekhususan pada pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material semata, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat yang sangat kekal dan lebih terjamin.

Sehingga kebijakan fiskal negara Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan yang ada saat ini jika dipandang dalam perspektif ekonomi Islam

¹³⁷ Abu Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Growth in An Islamic Economy* tulisan dalam *Devolement and Finance in Islam*, (Malaysia: Internasional Islamic University Press, 1987), h. 56

masih jauh dari standar ekonomi Islam. Kebijakan fiskal yang ada cenderung berfokus pada pembangunan ekonomi yang hanya meliputi: kinerja sumber daya manusia (SDM) negara yang bertugas mendistribusikan dana desa kepada masyarakat yang ternyata belum maksimal, pembangunan infrastruktur yang belum merata, ketahanan pangan yang kurang dan program perlindungan sosial yang kurang maksimal.

Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam kebijakan fiskal dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya meliputi pembangunan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan, tapi juga mengentaskan kemiskinan dalam keterpaduan unsur spiritual, moral dan material yang ditujukan pada manusia dan lingkungannya atas dasar hukum Allah SWT.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan fiskal dan pengentasan kemiskinan. Dalam data yang ditemukan terdapat kurang maksimalnya kinerja dana desa dalam pengentasan kemiskinan 3 tahun terakhir. Dalam Islam pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan ekonomi yang tidak hanya dalam pengentasan kemiskinan saja, tetapi juga bertanggungjawab terhadap keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Pemimpin harus mempertanggung jawabkan setiap perilaku dan kewajibannya dihadapan Allah SWT.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Instrumen Kebijakan Fiskal

Selain permasalahan distribusi, ekonomi islam juga menyoroti tentang sumber penerimaan dan pengeluaran. Dalam ekonomi konvensional, sumber penerimaan hanya berkisar pada pajak dan hutang, walaupun pada dasarnya negara juga memperoleh keuangannya dari retribusi, keuntungan BUMN dan lain sebagainya. Berbeda dengan ekonomi Islam, yang mana Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan pemerintah seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

Sumber penerimaan negara Indonesia terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dari sumber tersebut pendapatan negara secara keseluruhan telah mencapai Rp 1.894,7 triliun dari total penerimaan APBN 2018. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 275,4 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,2 triliun.¹³⁸ Kinerja positif penerimaan perpajakan di tahun ini semakin menunjukkan aktivitas perekonomian domestik yang terus meningkat sehingga mendorong konsumsi masyarakat serta kinerja bisnis. Penerimaan negara selalu identik dengan pendapatan negara.

Penerimaan migas dan nonmigas menunjukkan adanya ketergantungan keuangan negara pada kekayaan alam: padahal, kekayaan alam itu terbatas dan dapat habis. Ketergantungan berisiko tinggi, terutama jika ada tekanan

¹³⁸<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 15 September 2019 pada jam 06.06 WIB

atas harga minyak tanah dari dunia internasional. Peristiwa tersebut pernah dialami oleh pemerintah Indonesia (orde baru) sehingga memaksa dilakukannya deregulasi perpajakan. Untuk itu, pemerintah harus menggalakkan sumber penerimaan di luar migas.

Pajak atau pungutan lain yang diterima oleh pemerintah harus didasarkan pada Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pihak pemerintah. Selain berfungsi sebagai alat anggaran, pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian.

Penting pula dicatat bahwa pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self-assesment*, yaitu kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengeluaran negara merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk daerah atau regional.

Adapun mengenai realisasi belanja negara yang tercantum dalam APBN 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun. Besaran ini meliputi belanja pemerintahan pusat sebesar Rp 1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa

sebesar Rp 766,2 triliun.¹³⁹ Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2018 dialokasikan sebesar Rp 766,2 triliun. Alokasi ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah, serta mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah.

Belanja negara juga akan terus diarahkan terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar daerah sekaligus program perlindungan sosial untuk pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan diseluruh pelosok tanah air. Perlu disadari bahwa permasalahan ketimpangan antar wilayah mau tak mau masih menjadi kendala yang menghantui negara ini.

Dengan struktur pendapatan dan belanja negara diatas, maka defisit anggaran yang muncul diperkirakan mencapai Rp 325,9 triliun pada tahun 2018.¹⁴⁰ Kebijakan fiskal negara Indonesia tidak didasarkan pada hukum agama melainkan pada peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian Pancasila dan UUD 1945 masih mengakui eksistensi agama yang berarti pula hukum agama. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang bertentangan dengan tujuan hukum agama berarti tidak sesuai dengan kehendak Pancasila dan UUD 1945.

¹³⁹<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 15 September 2019 pada jam 11.10 WIB

¹⁴⁰*Ibid.*,

Sementara itu, ekonomi Islam merupakan bagian hukum agama yang mengatur segala kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini, menjadikan ekonomi Islam tidak selalu tergantung pada nash secara tekstual, namun memberikan peluang ijtihad lebih besar, serta tidak melibatkan iman dan niat. Sekalipun demikian, ekonomi Islam harus dalam koridor “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat” (*dar ul-mafasid muqoddamu ‘ala jalbil masholih*)” sebagai tujuan agama.

Atas dasar itu, semua pungutan yang ditetapkan dengan undang-undang, dan menjadi penerimaan dan pengeluaran negara masih dibenarkan syariah. Bahkan Nabi SAW. memberi amanat kepada pemerintah untuk memungut harta selain zakat. Tujuan dari pemungutan pajak oleh pemerintah negara Indonesia tidak berbeda dengan tujuan pemungutan pajak dalam negara Islam. Di samping sebagai penerimaan negara, pemungutan pajak juga dimaksudkan untuk meratakan pendapatan penduduk.

Zakat merupakan kewajiban bagi sebagian besar warga negara Indonesia yang didasarkan pada agama yang dianutnya (Islam). Kewajiban ini berupa membayar sejumlah harta kepada/melalui amil zakat. Diantara ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kewajiban membayar zakat bagi setiap umat Islam:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩﴾ (التوبة: ١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁴¹

Ayat diatas juga menunjukkan adanya perintah untuk memungut zakat.

Pemungutan ini tentunya harus dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan syariat yang berlaku. Dalam pandangan syariat Islam, zakat menjadi salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam yang mampu. Zakat dalam agama Islam pada hakikatnya sebagai bagian dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah untuk dipergunakan sebagai kepentingan orang lain yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syariat. Zakat dipungut dari orang kaya (mampu menunaikan zakat) dan selanjutnya didistribusikan kepada orang miskin (*dhuafa*). Seperti halnya pajak, zakat juga diperoleh dari iuran masyarakat. Nabi SAW bersabda :

... فَأَخْبِرْهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
(رواه البخارى)

“... sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.” (HR. Bukhari).¹⁴²

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., h. 162

¹⁴² Imam Abi Khusain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993), h. 26-27

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama islam tentu sangat berpotensi dalam penghimpunan dana zakat. Pengalokasian dana zakat sebagai sumber pendapatan negara memiliki peluang yang sangat besar. Peluang tersebut salah satunya adalah sudah adanya regulasi tentang zakat yang menunjukkan bahwa zakat adalah keuangan negara. Regulasi tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaannya.

Dewasa ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (Baznas dan Baznas Daerah) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, baik LAZ yang sudah disahkan oleh pemerintah maupun yang belum disahkan.

Sebenarnya potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat di Indonesia sangat besar. Namun dalam realisasinya masih terdapat rendahnya tingkat kesadaran umat islam dalam berzakat yang disebabkan oleh banyak hal. Berbagai kemungkinan bisa menjadi penyebabnya, antara lain rendahnya kesadaran umat dalam berzakat, lemahnya kepercayaan umat terhadap lembaga pengelolaan zakat, kurangnya sumber daya dan prasarana pengelola zakat dan sebagainya. Akibat dari hal ini, mereka yang merasa berkewajiban menunaikan zakat menggelar penyaluran zakat sendiri.

Potensi zakat di Indonesia dengan jumlah yang sangat besar bukan hanya wacana semata, hal tersebut telah dibuktikan secara empiris oleh beberapa badan yang melakukan riset atau penelitian yang dilakukan oleh

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerja sama dengan fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Bank Pembangunan Islam (IDB). Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa potensi zakat rumah tangga sebesar Rp 82,7 Triliyun, potensi zakat industri mencapai Rp 114,89 Triliyun dan potensi zakat BUMN sebesar Rp 2,4 Triliyun. Adapun potensi zakat tabungan adalah sebesar Rp 17 Triliyun. Sehingga jika dikalkulasikan, jumlah potensi zakat tahun 2013 secara nasional sebesar Rp 217 Triliyun. Jumlah tersebut tentu akan semakin meningkat.¹⁴³

Di sini penulis, menyamakan tujuan zakat dengan pajak karena keduanya bersifat progresif, yakni pemungutan dikenakan atas penghasilan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat ekonomi lemah tidak dipungut pajak atau zakat, bahkan mereka akan mendapatkan bagian dari zakat atau pajak tersebut.

Dari uraian tersebut menunjukkan adanya peluang bagi negara untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peluang tersebut didasarkan pada keberadaan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang diharapkan dapat membantu keuangan negara. Dari tahun ketahun, pemerintah selalu mengalami tuntutan tugas layanan masyarakat yang semakin berat. Untuk itu dibutuhkan sumber pendanaan APBN yang juga

¹⁴³Siti Nurhasanah, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat". *Jurnal Akuntabilitas*", Vol. 11, No. 2, (2018)

semakin besar. Selama bertahun-tahun APBN mengalami defisit. Keberadaan zakat sebagai bagian dari APBN diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi masalah keuangan yang dihadapi pemerintah selama ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan fiskal negara Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan selama ini masih dalam koridor syariah. Hanya saja, implementasi sistem tersebut masih jauh dari yang diharapkan, tetapi tidak bertolak belakang. Pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam tidak hanya terletak pada unsur kepemimpinan saja, melainkan anjuran untuk menumbuhkan kualitas diri pribadi serta rasa sosial agar mampu berkontribusi juga dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
2. Adanya peluang bagi negara untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peluang tersebut didasarkan pada keberadaan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang diharapkan dapat membantu keuangan negara. Zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama, karena keduanya bersifat progresif, yakni pemungutan dikenakan atas penghasilan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat ekonomi lemah tidak dipungut pajak atau zakat, bahkan mereka akan mendapatkan bagian dari zakat atau pajak tersebut.

B. Rekomendasi

1. Sebagai instrument utama kebijakan fiskal, APBN mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Peran tersebut sejalan dengan fungsi APBN sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien, meredistribusi pendapatan, menjaga stabilitas serta akselerasi kinerja perekonomian. Untuk itu pemerintah diharuskan berupaya menjaga agar peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan agar penduduk miskin semakin menurun tiap tahunnya.
2. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah tidak hanya memfokuskan pada penerimaan dan pendistribusian dana umat, melainkan penerimaan dalam bentuk lain yang termasuk kedalam penerimaan versi zakat, melainkan juga pengelolaan zakat oleh negara, pemungutan al-jizyah dari kaum ahli kitab, pemberlakuan hukum fa'i dan ghanimah, serta kebijakan Nabi SAW atas kepemilikan umum. Terlebih lagi pengikut sertaan iman dan niat yang besar selain ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Karim, Adiwarman, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, Abu , *Sahih al-Bukhari*, Kitab: Shalat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadist : 844 (Berit : Dar as-Sa'bu, t.t), 139. Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, Cet. VII Jakarta: Sumber Wijaya, 1992.
- Abi Khusain Muslim, Imam, Shahih Muslim, Juz I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993.
- Al Arif , M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Al Arif , M. Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Andy, Hasan , *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2011.
- Arsyat, Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2015.
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005.
- Edwin Nasution, Mustafa, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, rev.ed.; Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hasan , M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Huda, Nurul, et.al, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, Malang: UMM Pres, 2005.
- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf : Relevnasinya dengan ekonomi kekinian*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003.
- Mannan, M.A. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Markus, Muda *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.
- Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta : Aditya Media, 1999.
- Pratama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro dan Suatu Pengantar edisi 3*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Rochaety, Eti dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rustanto, Bambang, *Menangani Kemiskinan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sami' Al-Misri, Abdul, Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami, Terj. Dimyauddin Djuwaini, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sri Rahayu, Ani, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sukirno, Sadono, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Surayitno, Eko, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Syamsi, Ibnu, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Wahyudi, Bambang, *Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Purwokerto: Vigi Bless Publisher, 2018.

2. Jurnal

Abdullah, Hayat, “Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital Dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan”. *Jurnal Bina Praja*”, Vol. 6, No. 2, Juni, 2014.

Ahmad Maslahatul Furqan, Salahuddin, Rizqi Anfanni Fahmi, “Diskursus Zakat Sebagai Sumber Penerimaan APBN”. *Working Paper Keuangan Publik Islam*”, No. 3, Seri 1, 2018

Ahyani, Shidqi , “Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Solusinya dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Sa’ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan Kemiskinan)”, *Jurnal Kariman*”, Vol. 04, No. 01, 2016

Anisa Dwi Aprilia, Darsono, Agustono, “Analisis Pengaruh Fiskal Dan Moneter Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Di Indonesia”. *Agrista*”, Vol. 4, No. 3, September, 2016.

- Asyari, “Keuangan Negara Dalam Islam (Melacak Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara)”. *Al-Hurriyah* , Vol. 10, No. 2, Juli-Desember, 2009.
- Eka Satya, Venti, “Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2013”. *Jurnal Kajian*”, Vol. 19, No. 2 Juni, 2014.
- Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen, Een N. Walewangko, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara”. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*”, Vol. 19, No. 7 2018.
- Fathurrahman, Ayief, “Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*”, Vol. 13, No. 1, April, 2012.
- Fauzan, Muhammad, “Kebijakan Fiskal Dalam Perkonomian Islam di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khatab”. *Human Falah*”, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni, 2017.
- Hendra Permana, Sony, “Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia”. *Aspirasi*”, Vol. 8, No. 1, Juni, 2017.
- HM, Muhdar, “Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia : Masalalu dan Solusi”, *Jurnal Al – Buhuts*”, Vol. 11, No. 1, Juni, 2015.
- Ichsan, Nurul, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam”. *Jurnal Pemikiran Islam*”, Vol. 19, No. 2, September, 2018.
- Juliandri Prihadi, Donny, “Keberadaan Ikan Kodok (*Antennarius maculates*, Desjardins 1840) di Pulau Nusa Penida Provinsi Bali”. *Jurnal Akuatika*”, Vol. 6, No. 2, September, 2015.
- Julismin, “Dampak dan Perubahan Iklim di Indonesia”. *Jurnal Geografi*”, Vol. 5, No. 1, 2013.
- Mardiana, Theresia Militina, Anis Rahma Utary, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Infrastruktur terhadap Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan”. *Jurnal Inovasi*”, Vol. 13 1, 2017.

- Mulyadi, Mohammad, "Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan dan Kesenjangan", *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial*", Vol. X, No. 09, 2018.
- Munthe, Salman, "Strategi Implementasi Sistem Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*", Vol. 1, No. 2, September, 2015.
- Nangarumba, Muara, "Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal dan Penyaluran Kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2016". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*", Vol. 8, No. 2, 2016.
- Ni'matul Ulya, Husna, "Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional". *Jurnal of Islam Economics and Business*", Vol. 1, No. 1, Januari-Juni, 2018.
- Nur Rohani, Muhamad, "Kemiskinan Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam". *Jurnal Dan Makalah*", Vol. 8, No. 1, Mei, 2014.
- Ras, Donny, "Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Socius*", Vol. XIV, Oktober-Desember, 2013.
- Rasiam, "Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Solusi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi)". *Jurnal Khatulistiwa*". Vol. 4, No. 1, Maret, 2014.
- Ridlo, Ali, "Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab". *Jurnal Al'-Adl*", Vol. 6 , No. 2, Juli, 2013.
- Rohman, Abdul, "Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Desa", *Jurnal Pembangunan Perdesaan*", Vol. IV No. 2, Agustus, 2004.
- Sari, Nurma, "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifhan Umar Bin Khattab". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*", Vol. 1, No. 2, September, 2015.
- Siti khumaira, An Nissa', "Kredit Berbasis Islam dalam Mengentaskan kemiskinan (Studi Kasus: Grameen Bank, Bangladesh)". *Jurnal the Moslem Planners*", 1, April-Mei, 2013.
- Sri Wahyudi Suliswanto, Muhammad, "Tingkat Keterbukaan Ekonomi di Negara ASEAN-5". *Jurnal NeO-Bis*", Vol. 10, No. 1, Juni, 2016.

Wibisana, Wahyu, “Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik”.
Jurnal Pendidikan Agama Islam”, Vol. 14, No. 1, 2016.

3. Internet

<http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/content/Publikasi/2018%20Jawaban%20Pemerintah%20Atas%20Pemandangan%20Umum%20FraksiFraksi%20DPR%20%20terhadap%20RUU%20APBN%20TA%202019%20Beserta%20Nota%20Keuangannya.pdf>

<http://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>

<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dwkajian.asp?search=masalah+pengangguran+dan+kemiskinan>

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20180702132003146906279>

https://setjen.pu.go.id/pusdatin/source/File%20pdf/03_Buku%20Induk%20Statistik/Buku%20Induk%20Statistik%20Tahun%202016.pdf

<https://www.bappenas.go.id/files/1313/5098/8840/bab-4.pdf>

https://www.bappenas.go.id/indeks.php/download_file/view/8728/1730/

https://www.bphn.go.id/data/documents/harmonisasi_hkm_pengelolaan_sumber_daya_kelautan_dalam_rangka_desentralisasi.pdf

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/10576/apbn-kita-edisi-september-2018.pdf>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/11213/buku-informasi-apbn-2019.pdf>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/11284/apbn-kita-edisi-desember-2018.pdf>

https://www.kemenkeu.go.id/media/12334/sp_kebijakan-fiskal-pemerintah-yang-pruden-mendukung-pencapaian-target-pembangunan-apbn-2019.pdf

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/7159/apbn-kita-edisi-februari-2018.pdf>

www.kemenkeu.go.id/media/10377/nota-keuangan-dan-rapbn-2019.pdf

[www.kemenperin.go.id/download/19418/Laporan-Analisis-Perkembangan-Industri-Edisi-II-\(Triwulan-I\)-2018](http://www.kemenperin.go.id/download/19418/Laporan-Analisis-Perkembangan-Industri-Edisi-II-(Triwulan-I)-2018)



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel APBN 2014-2018

APBN TAHUN 2014

URAIAN	2014
A. PENDAPATAN NEGARA	1.667,1
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.665,8
1. Penerimaan Perpajakan	1.280,4
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	385,4
II. PENERIMAAN HIBAH	1,4
B. BELANJA NEGARA	1.842,5
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.249,9
1. Belanja Kementrian Negara/Lembaga	637,8
2. Belanja Non Kementrian Negara/Lembaga	612,1
II. TRANSFER KE DAERAH	592,6
1. Dana Perimbangan	487,9
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	104,6
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(54,1)
D. SURPLUS / (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(175,4)
% DEFISIT TERHADAP PDB	(1,96)
E. PEMBIAYAAN	175,4
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	196,3
1. Perbankan dalam negeri	4,4
2. Non perbankan dalam negeri	191,9
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	(20,9)
1. Penarikan Pinjaman LN (Bruto)	39,1
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(1,2)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	(58,8)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	0,0

APBN TAHUN 2015

URAIAN	2015
A. PENDAPATAN NEGARA	1.793,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.790,3
1. Penerimaan Perpajakan	1.379,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	410,3
II. PENERIMAAN HIBAH	3.256,3
B. BELANJA NEGARA	2.039,4
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.392,4
1. Belanja Kementrian Negara/Lembaga	647,3
2. Belanja Non Kementrian Negara/Lembaga	745,1
II. TRANSFER KE DAERAH	647,0
1. Dana Perimbangan	637,9
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	9,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(93,9)
D. SURPLUS / (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(245,8)
% DEFISIT TERHADAP PDB	(2,21)
E. PEMBIAYAAN	245,8
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	269,7
1. Perbankan dalam negeri	4,4
2. Non perbankan dalam negeri	265,2
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	(23,8)
1. Penarikan Pinjaman LN (Bruto)	47,0
2. Pengerasan Pinjaman (SLA)	(4,3)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(66,5)

APBN TAHUN 2016

URAIAN	2016
A. PENDAPATAN NEGARA	1.822,5
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1820,5
1. Penerimaan Perpajakan	1.546,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	273,8
II. PENERIMAAN HIBAH	2,0
B. BELANJA NEGARA	2.095,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.325,6
1. Belanja Kementrian Negara/Lembaga	784,1
2. Belanja Non Kementian Negara/Lembaga	541,1
II. TRANSFER KE DAERAH	770,2
1. Dana Perimbangan	723,3
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	46,9
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(88,2)
D.SURPLUS / (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(273,2)
% DEFISIT TERHADAP PDB	(2,2)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II)	273,2
I. Pembiayaan Dalam Negeri	272,8
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	0,4

APBN TAHUN 2017

URAIAN	2017
A. PENDAPATAN NEGARA	1.750,3
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.748,9
1. Penerimaan Perpajakan	1.498,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	250,0
II. PENERIMAAN HIBAH	1,4
B. BELANJA NEGARA	2.080,5
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.315,5
1. Belanja Kementrian Negara/Lembaga	763,6
2. Belanja Non Kementian Negara/Lembaga	552,0
II. Tranfer ke Daerah dan Dana Desa	764,9
1. Tranfer Ke Daerah	704,9
2. Dana Desa	60,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(109,0)
D. SURPLUS / (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(330,2)
% DEFISIT TERHADAP PDB	2,41
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	330,2
I. Pembiayaan Utang	384,7
II. Pembiayaan Investasi	(47,5)
III. Pemberian Pinjaman	(6,4)
IV. Kewajiban Penjaminan	(0,9)
V. Pembiayaan Lainnya	0,3

APBN TAHUN 2018

URAIAN	2018
A. PENDAPATAN NEGARA	1.894,7
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.893,5
1. Penerimaan Perpajakan	1.618,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,4
II. PENERIMAAN HIBAH	1, 2
B. BELANJA NEGARA	2.220,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.454,5
1. Belanja Kementrian Negara/Lembaga	847,4
2. Belanja Non Kementian Negara/Lembaga	607,1
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	238,6
b. Subsidi	156,2
c. Belanja Lain-lain	67,2
II. Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa	766,2
1. Tranfer ke Daerah	706,2
a.l. a. Dana Bagi Hasil	89,2
b. Dana Alokasi Umum	401,5
2. Dana Desa	60,0
C. Keseimbangan Primer	(87,3)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)	(325,9)
% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,19)
E. Pembiayaan Anggaran (I+II+III+IV+V)	325,9
I. Pembiayaan Utang	399,2
a.l. Surat Berharga Negara (neto)	414,5
II. Pembiayaan Investasi	(65,7)
III. Pemberian Pinjaman	(6,7)
IV. Kewajiban Penjaminan	(1,1)
V. Pembiayaan Lainnya	0,2

Lampiran 2 Alokasi Dana Desa

**ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015 – 2018
MENURUT PROVINSI (Ribu Rupiah)**

PROVINSI	2015	2016	2017	2018
Aceh	1.707.817.995	3.829.751.986	4.892.571.795	4.457.512.950
Sumatera Utara	1.461.156.834	3.293.282.206	4.197.972.490	3.874.857.829
Sumatera Barat	267.003.839	598.637.609	796.538.971	790.787.312
Riau	445.646.965	999.278.616	1.269.305.925	1.254.688.851
Jambi	381.560.156	856.771.029	1.090.942.601	1.037.674.061
Sumatera Selatan	775.043.818	1.780.769.519	2.267.261.445	2.309.392.954
Bengkulu	362.962.239	813.896.546	1.035.340.413	945.638.279
Lampung	684.727.653	1.536.762.050	1.957.487.721	2.091.398.105
Jawa Barat	1.589.711.596	3.568.437.985	4.547.513.838	4.823.095.418
Jawa Tengah	2.228.889.296	5.002.426.341	6.384.442.058	6.737.083.091
Di Yogyakarta	128.076.618	287.695.629	368.567.559	361.894.397
Jawa Timur	2.214.014.855	4.969.123.651	6.339.556.181	6.368.745.359
Kalimantan Barat	537.066.678	1.241.607.506	1.616.725.259	1.688.279.973
Kalimantan Tengah	403.351.015	904.370.668	1.148.904.929	1.144.586.424
Kalimantan Selatan	501.119.950	1.125.244.835	1.430.375.412	1.316.573.429
Kalimantan Timur	240.542.413	540.759.158	692.420.247	730.928.055
Sulawesi Utara	402.546.360	1.124.644.395	1.161.358.872	1.065.411.508
Sulawesi Tengah	500.301.180	911.498.499	1.433.826.019	1.363.158.368
Sulawesi Selatan	635.355.795	1.425.595.011	1.820.518.240	1.986.216.686
Sulawesi Tenggara	496.077.234	1.126.867.317	1.482.032.772	1.411.237.132
Bali	185.428.984	416.264.690	537.258.505	531.141.963
NTB	301.797.520	677.494.47	865.014.066	983.185.878
NTT	812.875.565	1.849.353.802	2.360.353.320	2.537.837.576
Maluku	334.004.517	754.638.987	961.602.798	964.700.076
Papua	1.433.226.742	3.385.116.457	4.300.947.518	4.284.844.848
Maluku Utara	291.071.202	653.455.314	832.406.416	785.606.677
Banten	352.516.368	791.252.019	1.009.506.961	937.180.879

Bangka Belitung	91.927.560	206.293.612	261.661.579	264.571.725
Gorontalo	179.957.839	403.677.978	513.958.123	540.591.708
Kepulauan Riau		177.766.079	228.182.536	221.500.941
Papua Barat	449.326.962	1.074.690.239	1.364.412.395	1.329.719.076
Sulawesi Barat	162.091.634	363.558.853	461.094.687	472.270.192
Kalimantan Utara	129.874.894	291.096.987	369.938.349	387.688.280
JUMLAH	20.766.200.000	46.982.080.000	60.000.000.000	60.000.000.000





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp.0721-703260

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Renny Fildzah Sari Zullini

NPM : 1551010099

Pembimbing Akademik I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.

Pembimbing Akademik II : Mardiyah Hayati, S.P., M.S.I.

Judul Skripsi : KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA GUNA
MENGENTASKAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing	
			I	II
1	Jum'at, 15 Februari 2019	Seminar Proposal	-	-
2	Kamis, 04 April 2019	Perbaikan Proposal oleh pembimbing 2 - Menambahkan Indikator Kemiskinan - Menambahkan masalah kebijakan fiskal	-	
3	Jum'at, 12 April 2019	Perbaikan Proposal oleh pembimbing 2 - Menambahkan batasan masalah dan identifikasi masalah - Menambahkan kerangka piker	-	
4	Kamis, 18 April 2019	ACC Proposal oleh pembimbing 2 - Menambahkan identifikasi masalah	-	
5	Selasa, 23 April 2019	ACC Proposal oleh pembimbing I		-
6	Senin, 29 April 2019	Konsultasi BAB I, II, III oleh pembimbing 2	-	

7	Jum'at, 10 Mei 2019	Konsultasi BAB I, II, III oleh Pembimbing 2	-	
8	Senin, 20 Mei 2019	ACC BAB I, II, III oleh pembimbing 2 -Lanjut ke BAB IV dan V	-	
9	Kamis, 10 Juli 2019	Perbaiki BAB III oleh pembimbing 2 - Menambahkan Data Dana Desa	-	
10	Jum'at, 26 Juli 2019	Perbaiki BAB IV	-	
11	Rabu, 31 Juli 2019	ACC BAB IV dan V oleh Pembimbing 2	-	
12	Jum'at 09 Agustus 2019	Perbaiki BAB I – V oleh Pembimbing 1		-
13	Jum'at 16 Agustus 2019	Perbaiki BAB I – V oleh Pembimbing 1		-
14	Selasa 20 Agustus 2019	ACC SKRIPSI oleh Pembimbing 1		-

Bandar Lampung, 21 Agustus 2019

Mengetahui

Pembimbing Akademik I,

Pembimbing Akademik II,

Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.
NIP. 19530423198003100

Mardiyah Hayati, S.P., M.S.I.
NIP. 197605292008012010